



# LAPORAN KINERJA

## TAHUN 2020



**DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2021**



## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud penerapan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020. Format laporan ini disusun berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini menguraikan capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan selama bulan Januari–Desember 2020 berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melaksanakan kegiatan pengamanan areal pertanaman tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan) dengan target rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan minimal 75% dan rasio luas area terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan total area terkena DPI minimal 60%. Pengukuran capaian indikator kinerja pengamanan areal dari serangan OPT dan DPI menggunakan periode serangan Oktober 2019 - September 2020 disesuaikan dengan periode pertanaman yang berproduksi pada periode Januari-Desember 2020. Capaian indikator kinerja tersebut merupakan hasil dari realisasi pelaksanaan berbagai kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam rangka pengamanan areal pertanaman tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI. Oleh karena itu dalam laporan ini juga disajikan realisasi kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang berkontribusi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan selama tahun 2020.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diukur capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Januari-Desember tahun 2020 sekaligus dapat dipahami faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini sehingga kami dapat menyelesaiannya. Saran dan masukan dari berbagai pihak tetap kami harapkan sebagai bahan dan perbaikan untuk penyusunan laporan berikutnya.

Jakarta, Februari 2021  
Direktur,

Dr. Ir. Mohammad Takdir Mulyadi, M.M  
NIP 196304231989031002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2020 yaitu mengamankan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (banjir dan kekeringan) dengan target rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan minimal 75% dan rasio luas areal terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan total areal terkena DPI minimal 60%. Sasaran tersebut dicapai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan utamanya, yaitu: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI), Gerakan Pengendalian OPT, Mitigasi DPI, Pengujian Mutu Produk Tanaman, Penyediaan Sarana Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, Kegiatan Padat Karya Covid 19, serta monitoring dan pembinaan pusat dan daerah.

Berdasarkan indikator kinerja di atas maka target luas aman dari serangan OPT dan terkena DPI masing-masing adalah 75% dan 60%. Realisasi luas area pertanaman yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT dan terkena DPI pada Tahun 2020 sebesar 98,5% dengan capaian 131,4% dan sebesar 74,5% dengan capaian 124,2%

Jumlah anggaran kegiatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI pada Tahun 2020 sebesar Rp. 300.871.322.000. Pada Tahun 2020, realisasi anggaran mencapai Rp. 296.042.061.297 atau 98,39% dari pagu anggaran. Realisasi kegiatan utama perlindungan tanaman pangan pada Tahun 2020 antara lain: PPHT padi, jagung, kedelai/kacang tanah/kacang hijau dan ubi kayu (100%); gerakan pengendalian padi, jagung dan kedelai (99,90%); pengujian mutu produk tanaman (100,94%); perbanyak APH/refugia (100%), perbanyak rumah burung hantu (99,23%); PPAH (100%); bantuan pengadaan *drone* (100%); bantuan pengadaan *Hand Sprayer* (100%); pengadaan penangkaran kandang burung hantu (100%); dan bantuan pengadaan pestisida, pestisida biologi, herbisida, insektisida ulat grayak *Spodoptera frugiperda*, rodentisida pengasapan, dan moluskisida (100%). Pemberian bantuan dalam rangka penanganan DPI yaitu pompa air (100%), sumur suntik (100%), sarana pengaliran/penampungan air (100%), dan pembangunan dan rehabilitasi sumur bor *solar cell* dan *engine diesel* (100%). Bantuan pengadaan sarana pengendalian OPT (pusat dan daerah) sudah terlaksana

100%. Salah satu kegiatan bantuan dalam rangka pandemi Covid 19, yaitu gerakan pengendalian OPT padat karya sudah terlaksana 100% sedangkan untuk penanganan DPI padat karya 95,54%.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	3
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.4. Sumber Daya Manusia .....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	6
2.1. Perencanaan Kinerja .....	6
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	8
2.3. Kebijakan dan Strategi .....	9
2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
3.1. Pengukuran Kinerja .....	12
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	14
3.3. Pelaksanaan Kegiatan Utama .....	21
BAB IV PENUTUP .....	44
LAMPIRAN .....	46

## DAFTAR TABEL

1. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 .....	5
2. Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 .....	7
3. Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2019 .....	11
4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 .....	12
5. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 per Komoditas .....	13
6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun .....	14
7. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 per Komoditas .....	14
8. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Padi Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun .....	15
9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun .....	16
10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kedelai Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun .....	17
11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun .....	18
12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun .....	19
13. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Kayu Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun .....	20
14. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Jalar Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun .....	21
15. Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020.....	22
16. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tahun 2020 .....	23
17. Rencana dan Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian Tahun 2020.....	25

18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 .....	41
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Pangan di Indonesia MT 2014/2015 – 2019/2020 Dan Rerata 5 MT.....	47
2.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Padi di Indonesia MT 2019/2020.....	48
3.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Jagung di Indonesia MT 2019/2020.....	49
4.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kedelai di Indonesia Tahun 2020 .....	50
5.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Tanah di Indonesia MT 2019/2020.....	51
6.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Hijau di Indonesia MT 2019/2020.....	52
7.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Ubi Kayu di Indonesia MT 2019/2020.....	53
8.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Ubi Jalar di Indonesia MT 2019/2020.....	54
9.	Luas Banjir pada Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 2016 – 2020 dan Rerata 5 Tahun .....	55
10.	Luas Kekeringan pada Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 2016 – 2020 Dan Rerata 5 Tahun .....	56
11.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Padi di Indonesia Tahun 2020.....	57
12.	Luas Banjir Dan Kekeringan pada Tanaman Jagung di Indonesia Tahun 2020.....	58
13.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Kedelai di Indonesia Tahun 2020.....	59
14.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Kacang Tanah di Indonesia MT 2019/2020.....	60
15.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Kacang Hijau di Indonesia MT 2019/2020.....	61

16. Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Ubi Kayu di Indonesia MT 2019/2020.....	62
17. Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Ubi Jalar di Indonesia MT 2019/2020.....	63
18. Realisasi PPHT Tahun 2020.....	64
19. Realisasi PPDPI Tahun 2020.....	65
20. Realisasi Gerakan Pengendalian Tahun 2020.....	66
21. Realisasi Bahan Perbanyakkan APH/Refugia Tahun 2020 .....	67
22. Realisasi Rumah Burung Hantu Tahun 2020 .....	68
23. Realisasi Pos Pengendali Agens Hayati (PPAH) Tahun 2020 .....	69
24. Realisasi Kegiatan Penanganan Kekeringan (Sumur Suntik) Tahun 2020	70
25. Realisasi Bantuan Sarana Penampungan/Pengalir Air Tahun 2020.....	71
26. Realisasi Bantuan Sarana PengendalianOPT Tahun 2020.....	72
27. Realisasi Gerakan Pengendalian OPT Padat Karya Tahun 2020 .....	73
28. Realisasi Gerakan Pengendalian Pengendalian OPT Padat Karya Akabi Tahun 2020.....	74
29. Realisasi Penanganan DPI Padat Karya Tahun 2020 .....	75
30. Realisasi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumur Bor <i>Solar Cell</i> dan <i>Engine Diesel</i> Tahun 2020.....	76



## I. P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yang terkait dengan sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,7% melalui modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani. Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dari produksi dalam negeri: padi (59,15 juta ton) dan jagung (24,17 juta ton).

Tahun 2020 adalah tahun pertama masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana salah satu agenda pembangunan RPJMN IV adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan inovasi dan investasi pangan dan pertanian sehingga terwujud akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian. Pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian pada RPJMN III, didorong oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas.

Arah kebijakan lima tahun kedepan yang terkait pada pengelolaan sumber daya ekonomi adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, yang akan dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, *fortifikasi* dan *biofortifikasi* pangan,
- 2) Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian,
- 3) Meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan SDM pertanian,
- 4) Meningkatkan produktifitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian,
- 5) Meningkatkan tata Kelola sistem pangan nasional. Delapan Kegiatan Utama Dalam rangka mengimplementasikan arahan tersebut, Kementerian Pertanian berupaya mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern karena dibutuhkan lompatan yang cepat untuk mencapainya. Sinergi informasi dan data diwujudkan dengan pembangunan single data AWR (*Agriculture War Room*). AWR menjadi jembatan informasi bagi pengambil kebijakan dengan para petani dan penyuluh di lapangan. AWR juga menjadi pusat kendali dan pemantauan secara real time kondisi pertanaman dan potensi pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Program dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan dialokasikan dalam rangka mendukung program utama kementerian pertanian, untuk Peningkatan produksi 7%, peningkatan ekspor tiga kali lipat, peningkatan KUR Rp. 14,23 Triliun, peningkatan investasi yang berbasis pada kawasan tanaman pangan

korporasi. Target peningkatan produksi padi sebesar 12,12% di tahun 2020 yaitu 59,15 juta Ton, peningkatan produksi jagung 7% sebesar 24,17 juta Ton dan peningkatan produksi kedelai 0,48 juta Ton. Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Korporasi (Propaktani) diwujudkan dalam kegiatan pengembangan padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, porang dan sorgum, fasilitasi alsin pasca panen dan pengolahan, fasilitasi sumur pantek untuk mengatasi kekeringan, pestisida/herbisida, pengembangan kawasan korporasi padi 116 kawasan, korporasi jagung 80 kawasan, korporasi kedelai 44 kawasan, kawasan luas *show windows* 7 lokasi.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (Ditlin TP) merupakan unit kerja di bawah Ditjen TP menjalankan tugas fungsi pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dirancang dalam rangka mengamankan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) tetap berdasarkan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga serta menjadikan petani sebagai ahli PHT. Oleh karena itu, kebijakan dalam upaya pengendalian OPT dan penanganan DPI di pertanaman lebih mengedepankan tindakan *pre-emptif* atau bersifat pencegahan melalui pengelolaan tanah secara benar, penelusuran budidaya yang mencakup pengaturan waktu dan pola tanam, pergiliran varietas, penggunaan pupuk, pemilihan dan perlakuan benih yang unggul serta pengamatan rutin. Apabila dalam pelaksanaannya diperkirakan akan terjadi peningkatan serangan OPT, maka dapat dilakukan tindakan *responsif* melalui aplikasi Agens Pengendali Hayati (APH), pestisida nabati atau pestisida kimia dengan tetap melaksanakan prinsip enam tepat (6T) yaitu: sasaran, jenis, dosis, waktu, cara dan mutu. Selain itu, dalam menjaga kualitas produk tanaman pangan dari senyawa kimia/kandungan logam/residu agar aman dikonsumsi dan efektivitas daya kerja pestisida dapat dilakukan melalui pengujian mutu produk tanaman.

Kegiatan Utama Ditlin TP yang dirancang pada Tahun Anggaran 2020 antara lain:

- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
- Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)
- Gerakan Pengendalian OPT
- Perbanyak Rumah Burung Hantu (Rubuha)
- Pengadaan Bahan perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) /Refugia
- Pengembangan PPAH

- Pengujian Mutu Produk Pertanian
- Kegiatan padat karya
- Pengadaan sarana penanganan DPI
- Pengadaan sarana pengendalian OPT

Dalam pelaksanaannya, fasilitasi sarana kegiatan yang diberikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah. Mekanisme penyaluran bantuan diatur sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PKMK) nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan diadaptasikan kedalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebagai institusi yang bertanggungjawab mengamankan pertanaman tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI, menetapkan target pengamanan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI yaitu target rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan minimal 75% dan rasio luas area terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan total area terkena DPI minimal 60%. Sinergi dari berbagai instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah diperlukan untuk mendukung target sasaran pengamanan dimaksud.

## 1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- 3) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;

- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

### **1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Subdirektorat, yaitu:

- 1) Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- 2) Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia.
- 3) Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi.
- 4) Subdirektorat Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim.

Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan juga didukung oleh Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Permenpan No. 43/Permentan/01.140/8/2015

**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan**

#### 1.4. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2020, jumlah sumber daya manusia lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebanyak 62 orang pegawai dan 11 orang Tenaga Harian Lepas. Secara rinci, keadaan pegawai di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020

No.	Unit	Golongan				THL	JML
		IV	III	II	I		
1	Direktur	1	0	0	0	0	1
2	Subbagian Tata Usaha	1	7	4	0	9	21
3	Subdit. Kelembagaan Data dan Pengendalian	3	12	-	0	0	15
4	Subdit. Penanggulangan Dampak Perubahan	3	8	0	0	0	11
5	Subdit. Pengendalian OPT Serealia	1	10	2	0	0	13
6	Subdit. Pengendalian OPT Akabi	1	7	0	0	0	8
	Jumlah	10	44	6	0	9	69

## II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Kinerja

Mengacu pada rancangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020, sasaran produksi komoditi strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Tahun 2020 yaitu:

- 1) Padi sebesar 59,15 juta ton
- 2) Jagung sebesar 24,17 juta ton
- 3) Kedelai sebesar 0,48 juta ton
- 4) Kacang tanah sebesar 0,42 juta ton
- 5) Kacang hijau sebesar 0,19 juta ton
- 6) Ubi kayu sebesar 22,9 juta ton
- 7) Ubi jalar sebesar 1,43 juta ton

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan upaya di atas. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun serta memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Keselarasan Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian sasaran produksi.

Pada tahun 2020, pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di pusat didukung dengan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sedangkan di daerah didukung dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA Dana Dekonsentrasi melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). Alokasi kegiatan utama Penguatan Sistem Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI pada Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020

No	Kegiatan Utama	Satuan	Target	
			Fisik	Keuangan (Rp)
1	Pemantapan Penerapan PHT (Ha)	Ha	4.080	4.678.100.000
2	Penerapan Penanganan DPI (ha)	Ha	550	2.553.649.000
3	Gerakan Pengendalian OPT (Ha)	Ha	20.083	8.546.422.000
4	Pengujian Mutu Produk Tanaman (LHP/sertifikat)	LHP/sertifikat	1.600	5.034.880.000
5	Bahan Perbanyakkan APH/Refugia (Unit)	Unit	86	1.883.560.000
6	Perbanyakkan Rumah Burung Hantu (Unit)	Unit	780	1.560.000.000
7	Pos Pengembangan Agens Hayati (Unit)	Unit	77	770.000.000
8	Pompa air (unit)	Unit	4.815	78.788.000.000
9	Sumur suntik (paket)	Paket	140	1.750.000.000
10	Sarana pengaliran /Penampung air (paket)	Paket	18	900.000.000
11	Sarana Pengendalian OPT Pusat (Ha)	Ha	279.568	57.200.040.000
	Sarana Pengendalian OPT Daerah (paket)	Paket	35	3.168.897.000
12	Pengadaan drone (unit)	Unit	23	969.500.000
13	Pengadaan Hand Sprayer (unit)	Unit	2.000	1.000.000.000
14	Pengadaan Penangkaran Kandang Burung Hantu (unit)	Unit	5	250.000.000
15	Gerdal OPT Padat Karya (Ha)	Ha	27.460	10.984.000.000
16	Penanganan DPI Padat Karya (Ha)	Ha	20.000	7.600.000.000
17	Pengadaan Pestisida (paket)	Paket	1	10.000.000.000
	Pengadaan Pestisida Biologi (Ha)	Ha	18.500	3.700.000.000
18	Pengadaan Pestisida:			
	a. Bantuan Herbisida (Ha)	Ha	4.167	500.040.000
	b. Bantuan Pestisida (2kg/L per Ha) (Ha)	Ha	51.000	10.200.000.000
	c. Bantuan Insektisida ulat grayak S. frugiperda (1 kg/L per Ha) (Ha)	Ha	400	1.540.000.000
	d. Rodentisida Pengasapan (25 batang/Ha)	Ha	5.500	1.100.000.000
	e. Bantuan moluskisida (paket) (Ha)	Paket	1	160.000.000
		Ha	150.000	30.000.000.000
19	Pengadaan Pestisida dan Herbisida Food Estate Kabupaten Sumba Tengah (kg/L)	kg/L	12.000	1.200.000.000
	Pengadaan Pestisida dan Herbisida Food Estate Kabupaten Buru (kg/L)	kg/L	6.000	360.000.000
20	Pembangunan dan Rehabilitasi Sumur Bor Solar Cell dan Engine Diesel (paket)	Paket	23	4.470.000.000

## 2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

### 1) Visi

Terwujudnya sistem pengamanan areal pertanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan) melalui penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan adaptasi perubahan iklim.

### 2) Misi

- a. Meningkatkan pengamatan dan sistem peringatan dini OPT dan DPI.
- b. Meningkatkan gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman.
- e. Meningkatkan penyediaan sarana penanggulangan OPT dan DPI.

### 3) Tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan kinerja perlindungan tanaman pangan dalam pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi tanaman pangan.

### 4) Sasaran yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatnya fungsi sistem pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT serta penanganan DPI.
- b. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan.
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman dalam pemahaman dan penerapan sistem perlindungan tanaman pangan.
- d. Tersedianya informasi teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT yang efektif dan efisien.
- e. Terlaksananya gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI secara terpadu dalam skala luas.
- f. Terkendalinya luas serangan OPT dan gangguan DPI pada tanaman pangan.
- g. Meningkatnya mutu dan daya saing produk tanaman pangan.

### 2.3. Kebijakan dan Strategi

Perlindungan tanaman pangan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil sesuai dengan sasaran produksi tanaman pangan. Pelaksanaannya dengan mendorong kemandirian petani dalam penanganan OPT dan DPI, sedangkan pemerintah berperan dalam memberikan informasi, teknologi dan bantuan sarana pengendalian dalam keadaan eksplosi. Mengacu kepada visi, strategi dan kebijakan perlindungan tanaman pangan, program perlindungan tanaman pangan mencakup lima subsistem perlindungan sebagai fokus kegiatan yaitu:

- 1) Penguatan Pengamatan dan Pengendalian Dini
- 2) Penerapan Teknologi
- 3) Penguatan Kelembagaan
- 4) Penguatan SDM
- 5) Penyediaan Sarana Pengendalian OPT.
- 6) Penyediaan Sarana Penanganan DPI

Kebijakan pengendalian OPT adalah pelaksanaan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan mengedepankan tindakan *pre-emptif*. Prinsip PHT meliputi penerapan budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, pemanfaatan musuh alami dan mendorong petani sebagai ahli PHT. Apabila dalam pelaksanaan pengamanan pertanaman terjadi peningkatan populasi yang tidak dapat diatasi dengan cara *pre-emptif* maka dilakukan secara responsif menggunakan bahan pengendali kimia secara 6 (enam) tepat yaitu tepat sasaran, jenis, dosis, cara, waktu dan mutu. Selain itu untuk pengamanan produksi yang akan dikonsumsi, perlu dilakukan pengujian mutu produk tanaman.

Upaya pengamanan luas areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI dilakukan dengan:

- 1) pengamatan dan sistem peringatan dini OPT/DPI.
- 2) gerakan pengendalian OPT dan adaptasi DPI.
- 3) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman.
- 4) peningkatan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman; dan
- 5) penyediaan sarana penanggulangan OPT/DPI.

Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan gerakan pengamatan dan pengendalian dini dengan cara *pre-emptif* maupun responsif sehingga kehilangan hasil dapat ditekan.

Berdasarkan kebijakan dan strategi diatas Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan utamanya adalah Penerapan PHT (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI), Gerakan Pengendalian, sarana penanganan DPI, sarana pengendalian OPT, Perbanyak rumah burung hantu, penangkaran burung hantu, perbanyak Agens Pengendali Hayati/refugia, PPAH, Kegiatan padat karya dalam rangka covid-19.

Kegiatan Penerapan PHT Skala Luas merupakan salah satu bentuk pengamanan pertanaman tanaman pangan dengan memberdayakan petani alumni SLPHT dan mengikutsertakan petani yang belum mengikuti SLPHT (non alumni SLPHT). Penerapan PHT Skala Luas dilaksanakan selama satu musim tanam, mulai dari masa pra tanam sampai dengan panen yang terdiri dari pertemuan koordinasi, pra tanam, pasca tanam dan evaluasi pendampingan oleh petugas POPT-PHP/PPL/Mantri Tani.

Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) merupakan salah satu bentuk pengamanan pertanaman dengan memberdayakan petani alumni SLI dan atau petani yang memahami dan memiliki motivasi di bidang penanganan DPI yang lahannya di daerah rawan DPI (banjir/kekeringan). Teknologi yang digunakan dalam PPDPI adalah pembuatan biopori dan pembuatan sumur pantek.

Upaya peningkatan produksi berkelanjutan memerlukan strategi yang komprehensif. Penguatan agroekosistem merupakan faktor yang memengaruhi keberhasilan pertanaman mulai dari sebelum tanam sampai panen. Kondisi agroekosistem sangat berpengaruh terhadap perlindungan tanaman. Perencanaan agroekosistem merupakan langkah awal yang perlu dilakukan upaya pengendalian OPT.

## **2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020**

Pencapaian produksi pertanian tidak terlepas dari dari berbagai macam kendala yang mengganggu sistem produksi di lapangan. Beberapa gangguan seperti OPT dan DPI dapat mengakibatkan kerugian atau kehilangan hasil. Faktor gangguan OPT dan DPI merupakan risiko yang harus dihadapi dan diperhitungkan dalam setiap usaha budidaya tanaman pangan sehingga pengendalian OPT yang tidak tepat dan cepat dapat berakibat pada penurunan/ pengurangan produksi atau produktivitas tanaman.

Perlindungan tanaman merupakan suatu cara pendekatan atau cara berfikir pertimbangan ekologi dan ekonomi melalui pengamanan produksi tanaman pangan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Pelaksanaan perlindungan tanaman pangan ditujukan guna mencegah terjadinya pengurangan hasil produksi tanaman pangan.

Indikator Kinerja Tahun 2020 dalam rangka mengukur capaian upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI, Direktorat Perlindungan Tanaman sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target
1	Rasio Serangan OPT yang dapat ditangani terhadap Total Luas Serangan	75%
2	Rasio Luas Areal terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan Total Areal Terkena DPI	60%

Ket: data luas serangan OPT dan DPI yang digunakan adalah periode Okt 2019-Sep 2020

Upaya pencapaian sasaran strategis pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dilakukan melalui beberapa kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan baik di daerah maupun di pusat berupa fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI serta pengujian mutu produk tanaman. Jumlah anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 300.871.322.000,-.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan diperoleh dengan membandingkan luas serangan/terkena OPT/DPI yang dapat ditangani dengan total luas serangan/terkena. Data luas serangan OPT dan DPI diperoleh dari hasil pengamatan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) tingkat kecamatan yang dilaporkan ke Koordinator POPT di tingkat kabupaten/kota setiap dua minggu sekali, kemudian Koordinator POPT melaporkan ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan selanjutnya disampaikan ke Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di tingkat provinsi. Rekap data serangan OPT, banjir dan kekeringan per kabupaten selanjutnya dilaporkan oleh BPTPH ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, telah ditetapkan target indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020

No	Indikator	Terkena (ha)	Puso (ha)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan	560.425	8.201	98,5	75	131,4
2	Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area Terkena DPI	357.215	91.001	74,5	60	124,2

Data periode laporan 12 November 2020

Berdasarkan indikator kinerja diatas target rasio luas serangan/terkena OPT/DPI yang dapat ditangani terhadap total serangan OPT/DPI adalah 75% dan 60%. Realisasi areal tanaman pangan yang dapat ditangani dari gangguan OPT sebesar 98,5% dan DPI sebesar 74,5% sehingga capaian kinerjanya masing-masing adalah 131,4% dan 124,2%.

Luas serangan OPT sebesar 560.425 ha dan puso sebesar 8.201 Ha, terdiri dari total luas serangan dan puso OPT utama pada komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar (Okt 2019-Sep 2020) sehingga luas pertanaman yang dapat ditangani adalah 552.223 Ha atau 98,5% dari total luas serangan OPT. Sedangkan luas terkena DPI (banjir dan kekeringan) sebesar 357.215 ha dan puso 91.001 Ha berasal dari total luas terkena dan puso DPI pada tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi sehingga luas pertanaman yang dapat ditangani adalah 266.213 Ha atau 74,5% dari total luas area terkena DPI.

Penilaian terhadap capaian target indikator kinerja dilakukan dengan metode *scoring* yang dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil = capaian realisasi >100%
2. Berhasil = capaian realisasi 80 – 100%
3. Cukup Berhasil = capaian realisasi 60 – 79%
4. Kurang Berhasil = capaian realisasi <60%

Dengan metode skoring di atas, maka capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2020 sebesar 131,4% (OPT) dan 124,2% (DPI) sehingga masuk dalam kategori **Sangat Berhasil (>100%)**.

Rincian Capaian kinerja per komoditas dan perbandingan dengan capaian kinerja sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 per Komoditas

Indikator Kinerja		Komoditas	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan	a. Padi	75	98,17	130,90
		b. Jagung	75	99,35	132,46
		c. Kedelai	75	97,93	130,58
		d. Kacang Tanah	75	99,94	133,26
		e. Kacang Hijau	75	100,00	133,33
		f. Ubi Kayu	75	99,41	132,54
		g. Ubi Jalar	75	100,00	133,33
<b>Total</b>			75	98,54	131,38
2	Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area Terkena DPI	a. Padi	60	71,22	118,70
		b. Jagung	60	88,40	147,34
		c. Kedelai	60	73,24	122,06
		d. Kacang Tanah	60	88,52	147,54
		e. Kacang Hijau	60	71,47	119,12
		f. Ubi Kayu	60	100,00	166,67
		g. Ubi Jalar	60	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total</b>			60	74,52	124,21

Data periode laporan 12 November 2020

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 2020, Tahun 2019 dan Rerata 5 Tahun

	Indikator Kinerja	Tahun 2020 (%)		Tahun 2019 (%)		Rerata 5 Tahun (%)	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan	75	131,38	75	131,19	75	131,67
2	Rasio Luas Area yang ditangani dibandingkan Area Terkena DPI	60	124,21	60	112,22	60	121,06

Data periode laporan 12 November 2020

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020

Secara rinci, capaian pelaksanaan kegiatan pengamanan tanaman dari serangan OPT dan DPI adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 per Komoditas

NO	KOMODITAS	SERANGAN OPT/DPI (Ha)				AREAL YANG DAPAT DITANGANI OPT/DPI			
		OPT		DPI		OPT		DPI	
		T	P	T	P	Ha	%	Ha	%
1	Padi	386.692	7.070	288.674	83.084	379.622	98,17	205.590	71,22
2	Jagung	168.454	1.099	65.493	7.596	167.355	99,35	57.897	88,40
3	Kedelai	1.113	23	640	171	1.090	97,93	469	73,24
4	Kc. Tanah	1.793	1	1.113	128	1.792	99,94	986	88,52
5	Kc. Hijau	672	-	80	23	672	100,00	57	71,47
6	Ubi Kayu	1.378	8	1.215	-	1.370	99,41	1.215	100,00
7	ubi Jalar	323	-	-	-	323	100,00	-	#DIV/0!
<b>JUMLAH</b>		<b>560.425</b>	<b>8.201</b>	<b>357.215</b>	<b>91.001</b>	<b>552.223</b>	<b>98,54</b>	<b>266.213</b>	<b>74,52</b>

Ket : T= Terkena, P = Puso, Update tanggal 12 November 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase areal yang dapat ditangani akibat serangan OPT apabila dibandingkan dengan total luas serangan OPT berkisar 97,93% sampai dengan 100% dimana persentase tertinggi adalah komoditas kacang hijau dan ubi jalar sedangkan terendah pada komoditas kedelai. Sementara itu, persentase areal yang dapat ditangani akibat dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan) berkisar 71,22% sampai dengan 100% dimana persentase tertinggi terjadi pada komoditas ubi kayu dan terendah pada komoditas padi.

#### 1. Pengamanan Tanaman Padi

Target pengamanan pertanaman tanaman padi dari serangan OPT utama dan terkena DPI (banjir/kekeringan) tahun 2020 yaitu 75% dan 65%. Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama seluas 386.692 Ha, sedangkan seluas 7.070 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman padi yang dapat ditangani dari serangan OPT Tahun 2020 seluas 379.622 ha atau mencapai 98,17% dari total luas areal terserang OPT.

Luas areal pertanaman padi yang terkena DPI tahun 2020 seluas 288.674 ha, seluas 83.084 ha diantaranya mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman padi yang dapat ditangani dari total luas areal yang terkena DPI seluas 205.590 Ha atau mencapai 71,22%. Realisasi capaian indikator kinerja areal yang dapat ditangani dari serangan OPT mencapai 130,90% dan untuk DPI mencapai 109,57%.

Areal tanaman yang terkena serangan OPT pada tahun 2020 lebih tinggi 75.859 ha dan areal tanaman yang terkena DPI lebih rendah 248.446 dibandingkan dengan Tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan Rerata 5 Tahun, areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih rendah 18.411 ha dan DPI lebih tinggi 26.979 ha. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan rerata 5 tahun disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 8. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Padi Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun**

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN (14-18)		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Selisih 2020 & 2019		Selisih 2020 & Rerata	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	405.103	5.256	310.833	5.574	386.692	7.070	75.859	1.496	-18.411	1.814
Banjir & Kekeringan (DPI)	261.696	71.697	537.120	184.739	288.674	83.084	-248.446	-101.655	26.979	11.386
Areal yang dapat ditangani OPT	399.847		305.259		379.622		74.363		- 20.225	
Areal yang dapat ditangani DPI	189.998		352.381		205.590		- 146.790		15.592	
Nilai IK (%) OPT	98,70		98,21		98,17		98,03		109,85	
Nilai IK (%) DPI	72,60		65,61		71,22		59,08		57,79	
TARGET IK (%) OPT	75		75		75		75		75	
TARGET IK (%) DPI	65		65		65		65		65	
Capaian (%) OPT	131,60		130,94		130,90		130,70		146,47	
Capaian (%) DPI	111,70		100,93		109,57		90,90		88,91	

Data periode laporan 12 November 2020

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun mencapai kategori sangat berhasil (100,93% - 131,98%). Fluktuasi luas serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

## 2. Pengamanan Tanaman Jagung

Target pengamanan tanaman jagung dari serangan OPT dan terkena DPI tahun 2020 yaitu 75% dan 60% dari total areal terserang/terkena OPT dan DPI. Pada Tahun 2020, luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama jagung seluas 168.454 ha dan seluas 1.099 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman jagung yang dapat ditangani Tahun 2020 seluas 167.355 ha atau mencapai 99,35% dari total luas serangan OPT. Luas areal pertanaman jagung yang terkena DPI seluas 65.493 ha dan 7.596 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman jagung yang dapat diamankan dari total luas terkena DPI Tahun 2020 adalah 57.897 Ha atau mencapai 88,40% dari total areal terkena DPI. Apabila dibandingkan dengan target pengamanan areal pertanaman dari serangan OPT/DPI sebesar 75% dan

60%, maka realisasi tersebut mencapai 132,46% untuk OPT sedangkan untuk DPI realisasinya mencapai 136%.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih tinggi 128.584 ha dan DPI lebih tinggi 8.156 ha. Apabila dibandingkan dengan Rerata 5 Tahun, areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih tinggi 143.687 ha dan DPI tinggi tinggi 27.652 ha. Peningkatan signifikan ini terutama diakibatkan oleh adanya peningkatan serangan hama baru yaitu ulat grayak *Spodoptera frugiperda*. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan rerata 5 tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN (14-18)		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Selisih 2020 & 2019		Selisih 2020 & Rerata	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	24.767	152	39.870	115	168.454	1.099	128.584	984	143.687	947
Banjir & Kekeringan (DPI)	37.841	9.316	57.338	11.845	65.493	7.596	8.156	-4.249	27.652	-1.721
Areal yang dapat ditangani OPT	24.615		39.755		167.355		127.600		142.740	
Areal yang dapat ditangani DPI	28.524		45.493		57.897		12.404		29.373	
Nilai IK (%) OPT	99,39		99,71		99,35		99,23		99,34	
Nilai IK (%) DPI	75,38		79,34		88,40		152,09		106,22	
TARGET IK (%) OPT	75		75		75		75		75	
TARGET IK (%) DPI	65		65		65		65		65	
Capaian (%) OPT	132,51		132,95		132,46		132,31		132,45	
Capaian (%) DPI	115,97		122,07		136,00		233,99		163,42	

Data periode laporan 12 November 2020

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun mencapai kategori sangat berhasil dengan kisaran capaian 113,29% - 138,90%. Fluktuasi luas serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### 3. Pengamanan Tanaman Kedelai

Target luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI sebesar 75% Dan 60%. Pada Tahun 2020, luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama seluas 1.113 ha dan seluas 23 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT Tahun 2020 seluas 1.090 ha atau mencapai 97,93%. Sedangkan luas areal pertanaman kedelai yang terkena DPI seluas 640 ha dan seluas 171 ha diantaranya mengalami puso. Realisasi luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas terkena DPI Tahun 2020 seluas 469 ha atau mencapai 73,24%. Dengan demikian, realisasi capaian indikator kinerja pengamanan areal dari serangan OPT mencapai 130,58% dari target sebesar

75%, sedangkan untuk DPI realisasinya mencapai 112,67% dari target sebesar 60%.

Luas areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih rendah 791 ha dan DPI lebih rendah 1.538 ha apabila dibandingkan luas serangan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan Rerata 5 Tahun, areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih rendah 3.150 ha sedangkan DPI lebih rendah 4.242 ha. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan rerata 5 tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kedelai Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN (14-18)		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Selisih 2020 & 2019		Selisih 2020 & Rerata	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	4.264	27	1.905	24	1.113	23	-	791	-	1
Banjir & Kekeringan (DPI)	4.882	2.349	2.178	873	640	171	-	1.538	-	702
Areal yang dapat ditangani OPT	4.237		1.881		1.090		-	790		3.146
Areal yang dapat ditangani DPI	2.533		1.305		469		-	837		2.065
Nilai IK (%) OPT	99,37		98,74		97,93		-	99,87		99,87
Nilai IK (%) DPI	51,89		59,92		73,24		-	54,39		48,67
TARGET IK (%) OPT	75		75		75		-	75		75
TARGET IK (%) DPI	65		65		65		-	65		65
Capaian (%) OPT	132,49		131,65		130,58		-	133,16		133,16
Capaian (%) DPI	79,83		92,19		112,67		-	83,67		74,88

Data periode laporan 12 November 2020

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun mencapai kategori berhasil-sangat berhasil, kecuali untuk capaian DPI tahun 2017 yaitu 73,88% (73,88% - 133,27%). Upaya pengamanan produksi dari serangan OPT, banjir dan kekeringan terus dilaksanakan untuk menekan potensi kehilangan hasil. Fluktuasi luas serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### 4. Pengamanan Tanaman Kacang Tanah

Target luas areal pertanaman kacang tanah yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI minimal sebesar 75% untuk OPT dan 60% untuk DPI. Pada Tahun 2020, luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama seluas 1.793 ha dan 1 ha diantaranya mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang tanah yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT Tahun 2020 seluas 1.792 ha atau mencapai 99,94%.

Sedangkan luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena DPI seluas 1.113 ha atau dan seluas 128 ha diantaranya mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang tanah yang dapat diamankan dari total

luas terkena DPI Tahun 2020 seluas 986 ha atau mencapai 88,52. Bila dibandingkan dengan target, realisasi capaian indikator kinerja pengamanan areal pertanaman dari total luas serangan OPT mencapai 133,26%. Sedangkan capaian pengamanan areal pertanaman dari DPI realisasinya mencapai 136,19%. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, areal tanaman yang terkena serangan OPT pada Tahun 2020 lebih tinggi 443 ha dan DPI lebih rendah 6.550 ha. Apabila dibandingkan dengan Rerata 5 Tahun, areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih rendah 353 ha dan DPI lebih tinggi 696 ha.

Tabel 11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN (14-18)		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Selisih 2020 & 2019		Selisih 2020 & Rerata	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	2.146	2	1.350	4	1.793	1	443	-	3	-
Banjir & Kekeringan (DPI)	418	107	7.663	174	1.113	128	6.550	-	47	696
Areal yang dapat ditangani OPT	2.144		1.346		1.792		446		-	352
Areal yang dapat ditangani DPI	311		7.489		986		6.504			675
Nilai IK (%) OPT	99,92		99,71		99,94		100,64			99,77
Nilai IK (%) DPI	74,37		97,73		88,52		99,29			97,02
TARGET IK (%) OPT	75		75		75		75			75
TARGET IK (%) DPI	65		65		65		65			65
Capaian (%) OPT	133,22		132,95		133,26		134,19			133,03
Capaian (%) DPI	114,42		150,35		136,19		152,75			149,27

Data periode laporan 12 November 2020

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun mencapai kategori berhasil-sangat berhasil, kecuali untuk capaian DPI pada tahun 2017 (73,61%) dengan kisaran 73,61% - 150,35%. Upaya pengamanan produksi dari serangan OPT, banjir dan kekeringan terus dilaksanakan untuk menekan potensi kehilangan hasil. Luas serangan OPT, banjir dan kekeringan berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

## 5. Pengamanan Tanaman Kacang Hijau

Target luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI minimal sebesar 75% (OPT) dan 60% (DPI). Pada Tahun 2020, luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama seluas 672 ha akan tetapi tidak terjadi puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT Tahun 2020 seluas 672 ha atau mencapai 100%. Sedangkan untuk luas DPI dilaporkan seluas 80 ha dengan jumlah puso seluas 23 ha. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang hijau yang

dapat ditangani dari total luas terkena DPI Tahun 2020 seluas 57 ha atau mencapai 71,47%.

Luas serangan OPT tahun 2020 lebih tinggi 227 ha dan DPI lebih tinggi 26 ha apabila dibandingkan dengan luas serangan tahun 2019. Sedangkan jika dibandingkan dengan Rerata 5 Tahun, areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih rendah 131 ha dan DPI lebih rendah 430 ha. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN (14-18)		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Selisih 2020 & 2019		Selisih 2020 & Rerata	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	803	4	444	-	672	-	227	-	131	-
Banjir & Kekeringan (DPI)	510	98	54	35	80	23	26	-	430	-
Areal yang dapat ditangani OPT	799		444		672		227		127	
Areal yang dapat ditangani DPI	412		19		57		38		355	
Nilai IK (%) OPT	99,50		100,00		100,00		100,00		96,96	
Nilai IK (%) DPI	80,84		35,35		71,47		146,15		82,57	
TARGET IK (%) OPT	75		75		75		75		75	
TARGET IK (%) DPI	65		65		65		65		65	
Capaian (%) OPT	132,67		133,33		133,33		133,33		129,27	
Capaian (%) DPI	124,37		54,38		109,96		224,85		127,04	

Data periode laporan 12 November 2020

Areal pertanaman yang dapat diamankan dari serangan OPT sebesar 100% dari target 75% sehingga capaian indikatornya sebesar 133,33%. Areal pertanaman yang dapat diamankan dari DPI sebesar 71,47% dengan capaian indikator sebesar 109,96%.

## 6. Pengamanan Tanaman Ubi Kayu

Target luas areal pertanaman ubi kayu yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI minimal sebesar 75% untuk OPT dan 60% untuk DPI. Tahun 2020, luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama seluas 1.378 ha dan seluas 8 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kedelai yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT Tahun 2020 seluas 1.370 ha atau mencapai 99,41%

Luas DPI pada tahun 2020 dilaporkan mencapai 1.215 ha, akan tetapi tidak ada puso pada pertanaman ubi kayu. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman ubi kayu yang dapat ditangani dari total luas terkena DPI Tahun 2020 mencapai 1.215 Ha atau 100%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 75% untuk OPT dan 60% untuk DPI, maka realisasi pengamanan dari serangan OPT mencapai 132,54% sedangkan untuk DPI realisasinya mencapai 153,85%.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, areal tanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih tinggi 51 ha dan DPI lebih tinggi 484 ha. Apabila dibandingkan dengan Rerata 5 Tahun, areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2019 lebih rendah 1.367 ha dan DPI lebih tinggi 626 ha. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Kayu Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN (14-18)		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Selisih 2020 & 2019		Selisih 2020 & Rerata	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	2.746	44	1.328	11	1.378	8	51	-	3	-
Banjir & Kekeringan (DPI)	589	156	730	9	1.215	-	484	-	9	626
Areal yang dapat ditangani OPT	2.702		1.316		1.370		54		-	1.332
Areal yang dapat ditangani DPI	433		722		1.215		493		782	
Nilai IK (%) OPT	98,40		99,14		99,41		106,32		97,37	
Nilai IK (%) DPI	73,50		98,81		100,00		101,80		124,92	
TARGET IK (%) OPT	75		75		75		75		75	
TARGET IK (%) DPI	65		65		65		65		65	
Capaian (%) OPT	131,19		132,19		132,54		141,76		129,83	
Capaian (%) DPI	113,07		152,01		153,85		156,61		192,18	

Data periode laporan 12 November 2020

Upaya pengamanan produksi dari serangan OPT, banjir dan kekeringan terus dilaksanakan untuk menekan potensi kehilangan hasil. Capaian indikator kinerja dari serangan OPT tahun 2020 sebesar 132,54% dan DPI sebesar 153,85%. Perkembangan luas serangan OPT dan kerusakan akibat DPI dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

## 7. Pengamanan Tanaman Ubi Jalar

Target luas areal pertanaman ubi kayu yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI minimal sebesar 75% untuk OPT dan 60% untuk DPI. Pada Tahun 2020, luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama seluas 323 ha, dan dari total luas terkena OPT tersebut dilaporkan tidak terjadi puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman ubi jalar yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT Tahun 2020 seluas 323 ha atau mencapai 100%.

Pertanaman ubi jalar pada Tahun 2020 dilaporkan tidak terkena banjir dan kekeringan. Bila dibandingkan dengan target sebesar 75% untuk OPT dan 60% untuk DPI , maka realisasi tersebut mencapai 133,33%.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih rendah 23 ha dan DPI sama dengan tahun sebelumnya (0 ha). Apabila dibandingkan dengan Rerata 5 Tahun, areal tanaman yang terkena serangan OPT Tahun 2020 lebih rendah 57 ha dan DPI lebih rendah 34 ha. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Jalar Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN (14-18)		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Selisih 2020 & 2019		Selisih 2020 & Rerata	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	380	0	346	-	323	-	23	-	57	0
Banjir & Kekeringan (DPI)	34	10	-	-	-	-	-	-	34	10
Areal yang dapat ditangani OPT	380		346		323		23		57	
Areal yang dapat ditangani DPI	25		-		-		-		25	
Nilai IK (%) OPT	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Nilai IK (%) DPI	72,04		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		72,04	
TARGET IK (%) OPT	75		75		75		75		75	
TARGET IK (%) DPI	65		65		65		65		65	
Capaian (%) OPT	133,33		133,33		133,33		133,33		133,33	
Capaian (%) DPI	110,83		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		110,83	

Data periode laporan 12 November 2020

Upaya pengamanan produksi dari serangan OPT, banjir dan kekeringan terus dilaksanakan untuk menekan potensi kehilangan hasil. Capaian indikator kinerja dari serangan OPT sebesar 133,33. Luas serangan OPT, banjir dan kekeringan berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

### 3.3. Pelaksanaan Kegiatan Utama

#### A. Realisasi Kegiatan Utama

Capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan hasil dari pelaksanaan beberapa kegiatan utama perlindungan tanaman pangan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 15. Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020**

	Kegiatan Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan
1	Pemantapan Penerapan PHT (Ha)	4.080	4.678.100.000	4.080	4.669.527.566	100,00	99,82
2	Penerapan Penanganan DPI (ha)	550	2.553.649.000	550	2.469.681.000	100,00	96,71
3	Gerakan Pengendalian OPT (Ha)	20.083	8.546.422.000	20.063	8.423.472.604	99,90	98,56
4	Pengujian Mutu Produk Tanaman (LHP/sertifikat)	1.600	5.034.880.000	1.615	4.730.469.935	100,94	93,95
5	Bahan Perbanyakkan APH/Refugia (Unit)	86	1.883.560.000	86	1.882.305.400	100,00	99,93
6	Perbanyak Rumah Burung Hantu (Unit)	780	1.560.000.000	774	1.547.750.000	99,23	99,21
7	Pos Pengembangan Agens Hayati (Unit)	77	770.000.000	77	769.000.000	100,00	99,87
8	Pompa air (unit)	4.815	78.788.000.000	4.815	78.685.488.703	100,00	99,87
9	Sumur suntik (paket)	140	1.750.000.000	140	1.750.000.000	100,00	100,00
10	Sarana pengaliran /Penampung air (paket)	18	900.000.000	18	900.000.000	100,00	100,00
11	Sarana Pengendalian OPT Pusat (Ha)	279.568	57.200.040.000	279.568	56.691.888.500	100,00	99,11
	Sarana Pengendalian OPT Daerah (paket)	35	3.168.897.000	35	3.151.469.855	100,00	99,45
12	Pengadaan drone (unit)	23	969.500.000	23	810.410.000	100,00	83,59
13	Pengadaan Hand Sprayer (unit)	2.000	1.000.000.000	2.000	1.000.000.000	100,00	100,00
14	Pengadaan Penangkaran Kandang Burung Hantu (unit)	5	250.000.000	5	250.000.000	100,00	100,00
15	Gerdal OPT Padat Karya (Ha)	27.460	10.984.000.000	27.460	10.984.000.000	100,00	100,00
16	Penanganan DPI Padat Karya (Ha)	20.000	7.600.000.000	19.107	6.292.613.143	95,54	82,80
17	Pengadaan Pestisida (paket)	1	10.000.000.000	1	9.995.390.000	100,00	99,95
	Pengadaan Pestisida Biologi (Ha)	18.500	3.700.000.000	18.500	3.469.865.000	100,00	93,78
18	Pengadaan Pestisida:						
	a. Bantuan Herbisida (Ha)	4.167	500.040.000	4.167	499.951.000	100,00	99,98
	b. Bantuan Pestisida (2kg/L per Ha) (Ha)	51.000	10.200.000.000	51.000	9.974.492.500	100,00	97,79
	c. Bantuan Insektisida ulat grayak S. frugiperda (1 kg/L per Ha) (Ha)	400	1.540.000.000	400	1.539.150.000	100,00	99,94
	d. Rodentisida Pengasapan (25 batang/Ha)	5.500	1.100.000.000	5.500	1.095.725.000	100,00	99,61
	e. Bantuan moluskisida (paket) (Ha)	1	160.000.000	1	158.760.000	100,00	99,23
19		150.000	30.000.000.000	150.000	29.958.555.000	100,00	99,86
	Pengadaan Pestisida dan Herbisida Food Estate Kabupaten Sumba Tengah (kg/L)	12.000	1.200.000.000	12.000	1.175.050.000	100,00	97,92
	Pengadaan Pestisida dan Herbisida Food Estate Kabupaten Buru (kg/L)	6.000	360.000.000	6.000	308.700.000	100,00	85,75
20	Pembangunan dan Rehabilitasi Sumur Bor Solar Cell dan Engine Diesel (paket)	23	4.470.000.000	23	4.470.000.000	100,00	100,00

Data s.d. 22 Januari 2021

### a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)

Sistem Pengendalian Hama Terpadu adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan

lingkungan hidup. Kegiatan PPHT skala luas sebagai salah satu kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang dilaksanakan tujuan:

1. Menumuhukan prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani/kelompok tani untuk mengelola agroekosistem dalam satu hamparan.
2. Menerapkan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara bersama-sama dalam skala luas (hamparan) sebagai upaya pengamanan pertanaman dari serangan OPT.

PPHT skala luas serealia dilaksanakan pada dua komoditas tanaman yaitu padi dan jagung. Kegiatan PPHT Skala Luas Padi tahun 2020 direncanakan seluas 3.450 ha dengan pagu anggaran Rp. 3.774.520.000 yang tersebar di 31 provinsi (Lampiran 18). Kegiatan PPHT Skala Luas Jagung direncanakan sebanyak seluas 330 ha dengan pagu anggaran Rp. 361.990.000 yang tersebar di 22 provinsi (Lampiran 18). Realisasi kegiatan Penerapan PHT dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Tahun 2020

No	Kegiatan	Fisik (Ha)			Keuangan (Rp.)		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
	<b>TH 2020</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>100,00</b>	<b>4.678.100.000</b>	<b>4.669.527.566</b>	<b>99,82</b>
1	Padi	3.450	3.450	100,00	3.774.520.000	3.770.535.276	99,89
2	Jagung	330	330	100,00	361.990.000	359.904.835	99,42
3	Kedelai/K. Tanah/K. Hijau	285	285	100,00	468.660.000	466.157.455	99,47
4	Ubi Kayu	15	15	100,00	72.930.000	72.930.000	100,00

Data s.d. 22 Januari 2020

Realisasi kegiatan PPHT padi seluas 3.450 ha (100%) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 3.770.535.276,- (99,89%) dari pagu anggaran Rp. 3.774.520.000. Realisasi kegiatan PPHT Jagung seluas 330 ha (100%) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 359.904.835,- (99,42%) dari pagu anggaran Rp. 361.990.000. Luas areal Kegiatan PPHT Padi Tahun 2020 dibandingkan dengan kegiatan sejenis Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan baik luas areal kegiatan maupun anggarannya. Luas areal kegiatan PPHT Padi Tahun 2020 meningkat lebih dari dua kali lipat (105,97%) dibandingkan kegiatan PPHT Padi Tahun 2019 (1.675 ha). Anggaran kegiatan PPHT Padi juga meningkat sebesar 49,54% dibandingkan dengan pagu anggaran PPHT Padi Tahun 2019 (Rp.

2.524.000.000,-). Kegiatan PPHT Jagung Tahun 2020 dibandingkan dengan kegiatan sejenis Tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Luas areal kegiatan PPHT Jagung Tahun 2020 meningkat 10% dibandingkan dengan kegiatan PPH Jagung Tahun 2019 (300 ha). Anggaran kegiatan PPHT Jagung Tahun 2020 dibandingkan anggaran kegiatan sejenis Tahun 2019 (Rp. 494.390.000) mengalami penurunan sebesar 26,78%.

Realisasi anggaran untuk kegiatan PPHT Kedelai/Kacang Tanah/Kacang Hijau sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2020 sebesar Rp. 466.157.455,- (99,47%) dari pagu anggaran kegiatan PPHT Kedelai/Kacang Tanah/Kacang Hijau sebesar Rp. 468.660.000,-. Sedangkan untuk realisasi fisiknya sudah memenuhi target 100% yaitu 285 ha. Realisasi anggaran untuk kegiatan PPHT Ubi Kayu sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2020 sebesar Rp. 72.930.000,- (100%) dengan realisasi fisik seluas 15 Ha (100%).

**b. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)**

Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) adalah pemberdayaan petani dalam menerapkan upaya adaptasi menghadapi Dampak Perubahan Iklim (DPI) di lahan usaha taninya. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan prakarsa, motivasi dan kemampuan petani untuk secara mandiri menerapkan upaya penanganan DPI di lahan usaha taninya, sehingga resiko kehilangan hasil akibat DPI dapat diminimalkan

Hamparan pertanaman padi pada setiap unit kegiatan PPDPI yaitu seluas 10 ha dengan menerapkan teknologi sumur suntik. Alokasi kegiatan PPDPI pada T.A.2020 sebanyak 55 unit (seluas 550 ha), tersebar di 22 provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.553.649.000,-. Realisasi fisik kegiatan PPDPI seluas 550 ha atau 55 unit (100%), dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.469.681.000,- (96,71%). Target dan realisasi kegiatan PPDPI dapat dilihat pada Lampiran 19.

**c. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)**

Gerakan pengendalian (Gerdal) OPT merupakan implementasi kegiatan pengendalian OPT secara responsif. Tujuan dilaksanakannya Gerdal adalah untuk menurunkan populasi dan/atau intensitas serangan OPT pada pada

hamparan yang luas dan mengendalikan serangannya pada lokasi sumber serangan secara serentak dan bersama-sama. Kegiatan Gerdal OPT dilaksanakan oleh semua stakeholder usaha tani padi dan jagung, yang pelaksanaannya dapat secara swadaya masyarakat maupun dengan bantuan pemerintah. Selain itu, kegiatan gerdal diharapkan dapat memotivasi dan mengedukasi petani untuk melakukan tindakan pengendalian yang diperlukan dengan cara yang tepat dan bijaksana.

- Kegiatan Gerdal OPT Serealia dibagi menjadi dua, yaitu: Gerdal OPT Padi yang direncanakan seluas 15.283 ha dengan pagu anggaran Rp. 6.465.912.000 yang tersebar di 31 provinsi. Sedangkan Gerdal OPT Jagung direncanakan sebanyak 4.200 ha dengan pagu anggaran Rp. 1.811.290.000 yang tersebar di 30 provinsi.
- Kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Aneka Kacang dan Umbi dialokasikan untuk dilaksanakan pada komoditi dialokasikan untuk dilaksanakan pada komoditi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, atau ubi jalar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat serangan OPT yang terjadi di lapangan. Kegiatan gerdal tersebut dialokasikan untuk pertanaman aneka kacang dan umbi seluas 600 ha yang tersebar pada 22 Provinsi.

Tabel 17. Rencana dan Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian Tahun 2020

No	Kegiatan	Fisik (Ha)			Keuangan (Rp.-)		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
	TAHUN 2020	20.083	20.063	99,90	8.546.422.000	8.423.472.604	98,56
1	Padi	15.283	15.283	100,00	6.465.912.000	6.360.893.204	98,38
2	Jagung	4.200	4.200	100,00	1.811.290.000	1.803.594.200	99,58
3	Akabi	600	580	96,67	269.220.000	258.985.200	96,20

Data s.d. 22 Januari 2020

Realisasi kegiatan Gerdal OPT Padi sampai akhir Tahun 2020 seluas 15.283 ha (100%), dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6.360.893.204 (98,38%) dari pagu anggaran Rp. 6.465.912.000. Realisasi Gerdal OPT Jagung seluas 4.200 ha (100%) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.803.594.200 (99,58%). Kegiatan gerdal OPT Padi Tahun 2020 lebih rendah 19,79% jika dibandingkan dengan Tahun 2019 (realisasi Tahun 2019 seluas 19.055 ha). Sementara itu, kegiatan Gerdal OPT Jagung Tahun

2020 lebih tinggi 109,47% (realisasi Tahun 2019 seluas 2.005 ha). Rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan Gerdal OPT serealia secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 20.

Realisasi anggaran untuk kegiatan gerdal OPT aneka kacang dan umbi sebesar Rp. 258.985.200,- (96,20%) dari pagu anggaran kegiatan gerdal OPT aneka kacang dan umbi sebesar Rp. 269.220.000,- sedangkan realisasi fisiknya sebanyak 580 ha (96,67%) dari target 600 ha. Alokasi gerdal OPT Akabi seluas 20 ha di Provinsi Kalimantan Timur dengan target anggaran Rp. 9.000.000,- sampai dengan akhir bulan Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya lahan yang memenuhi kriteria serta keterbatasan pelaksanaan kegiatan selama pandemi covid-19 Lampiran 20.

#### **d. Pengujian Mutu Pestisida, Pupuk, dan Produk Tanaman**

Pestisida dan pupuk merupakan sarana produksi yang diperlukan dalam upaya mengamankan pertanaman dari gangguan OPT. Pestisida dan pupuk yang digunakan harus berkualitas baik dan diaplikasikan dengan tepat sehingga produk tanaman yang dihasilkan akan bermutu baik dan aman dikonsumsi.

Laboratorium pengujian mutu mempunyai peran sangat penting dalam melakukan pengujian dan menerbitkan Laporan/Sertifikat Hasil Pengujian dalam rangka untuk mengetahui mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman. Berdasarkan hasil pengujian mutu produk tanaman dapat diketahui tingkat keamanan produk dari cemaran pestisida, aflatoksin atau logam berat. Data hasil pengujian mutu pestisida dan pupuk digunakan untuk mengetahui apakah kualitas kandungannya masih sesuai dengan informasi yang tercantum dalam kemasannya.

Kegiatan pengujian mutu meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengujian dan pemantauan mutu pestisida, pupuk serta produk tanaman. Pengujian yang dilaksanakan meliputi pengujian mutu pestisida, mutu pupuk dan mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Selain itu juga dilakukan pemantauan mutu pestisida di lapangan. Tujuan dari pemantauan mutu pestisida adalah untuk mengetahui seberapa jauh mutu pestisida dan pupuk yang beredar dan meminimalisir terjadinya

penyimpangan mutu pestisida dan pupuk sehingga pestisida dan pupuk yang beredar dan digunakan oleh petani dapat terjamin mutu dan efektivitasnya sesuai formula yang terdaftar. Pengujian residu pestisida, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam berat dilaksanakan dalam rangka untuk melindungi dari cemaran yang melebihi Batas Maksimum Residu Pestisida.

Realisasi pengujian sampel pelanggan dan monitoring tahun 2020 mencapai 1.615 sertifikat LHP yang terdiri 583 sertifikat LHP sampel pelanggan dan 1.032 sertifikat LHP sampel hasil pemantauan mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman di wilayah Indonesia. Capaian pengujian sebesar 100,94 % dari target sebesar 1.600 sertifikat LHP (**sasaran diturunkan karena adanya wabah Covid 19 dan proses renovasi Gedung**).

Pengujian sampel internal pada tahun 2020 mencapai 1.032 sertifikat LHP dari rencana yang ditetapkan sebesar 99 sertifikat LHP. Hal ini karena sampel hasil pemantauan mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman yang dilakukan personil Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman mengalami peningkatan yang sangat besar untuk mengantisipasi pengujian eksternal yang relatif menurun.

Realisasi penggunaan anggaran pada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman sebesar Rp 4.730.469.933 atau 93,95 % dari pagu anggaran sebesar Rp 5.034.880.000.

Realisasi kegiatan dan anggaran tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1) Pengujian Mutu

Pagu anggaran untuk Pengujian Mutu sebesar Rp 1.546.178.000 dan teralisasi sebesar Rp 1.466.696.058 dengan capaian 94,86 %. Output yang dihasilkan berupa sertifikat LHP sebanyak 1.600 dengan capaian 100,94 % dari target 1.615 LHP. Anggaran tersebut digunakan untuk antara lain : Belanja barang (bahan kimia, gas, suku cadang, standar pestisida, standar mikotoksin, suku cadang, alat gelas, kolom dan ATK).

Pemantauan mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman dengan pagu anggaran sebesar RP 400.500.000 dengan realisasi Rp 393.460.904 (98,24 %). Kegiatan pemantauan tersebut terealisasi di 15 provinsi dari

target 15 provinsi. Selain itu juga dilaksanakan pemantauan dengan wilayah kabupaten yang ada di beberapa provinsi. Pemantauan juga dilakukan untuk pengambilan sampel air, tanah dan tanaman di lokasi desa organik.

Berdasarkan sampel yang diambil pada saat pemantauan dan sampel yang berasal dari pelanggan, setelah dilakukan pengujian maka diterbitkan sertifikat LHP. Kegiatan pemantauan mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pada umumnya dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuan dari pemantauan mutu pestisida dan pupuk adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh mutu pestisida dan pupuk yang beredar dan meminimalisir terjadinya penyimpangan mutu pestisida dan pupuk sehingga pestisida dan pupuk yang beredar dan digunakan oleh petani dapat terjamin mutu dan efektivitasnya sesuai formula yang terdaftar. Sedangkan pengujian residu pestisida, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam berat dalam rangka melindungi dari cemaran yang melebihi Batas Maksimum Residu Pestisida.

## 2) Pelatihan Teknis Laboratorium dan Manajemen

Pelatihan instrumen laboratorium dan manajemen meliputi pelatihan petugas laboratorium dan pelatihan sistem manajemen serta pelatihan internal. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.

Dalam rangka meningkatkan SDM personil Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman selama kurun waktu Januari – Desember 2020, personil yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 29 personil dari target 30 personil (96,67 %) dengan pagu anggaran Rp 180.420.000 dan terealisasi sebesar Rp 172.944.178 dengan capaian 95,86 %.

## 3) Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan meliputi Kegiatan Perencanaan, Pendampingan, 3M/LAKIP/PNBP/SPI/INSP/Doksistu, Pameran/Studi Banding/Survailen. Pagu anggaran untuk kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 940.280.000 terealisasi sebesar Rp 926.470.881 (98,53 %).

#### 4). Kegiatan Ketatausahaan

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.439.102.000 terealisasi sebesar Rp. 1.308.968.347 (90,96 %). Penggunaan anggaran tersebut antara lain untuk ATK, pemusnahan limbah, pengendalian hama di laboratorium, belanja peralatan dan mesin (komputer, scanner, laptop, printer, AC dll).

#### e. Bahan Perbanyakkan Agens Pengendali Hayati (APH)

Agens Pengendali Hayati (APH) merupakan salah satu bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang cukup efektif untuk mengendalikan OPT. Pemanfaatan APH cukup efektif untuk mengendalikan serangan OPT sejak dini dan relatif lebih aman bagi manusia dan lingkungan jika dibandingkan dengan pestisida kimia. Pengendalian OPT di tahap awal dengan memanfaatkan APH sangat disarankan karena populasi atau intensitas serangan masih rendah sehingga diharapkan dapat menekan risiko kerusakan lebih lanjut. Beberapa contoh APH yang dikembangkan yaitu *Metharizium* sp, *Beauveria* sp, dan lain-lain.

Selain APH, refugia juga berperan dalam pengendalian OPT secara alami. Refugia merupakan tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan, memiliki potensi sebagai tempat perlindungan dan sumber pakan bagi serangga musuh alami (baik predator/pemangsa maupun parasitoid). Refugia sebagai mikro habitat yang mendukung kegiatan konservasi musuh alami OPT. Perbanyakkan Bahan APH-Refugia bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan pengendalian OPT secara pre-emtif dan responsif dengan menyediakan bahan sarana pengendalian OPT yang ramah lingkungan. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya tersebut, maka pengembangan dan perbanyakkan beberapa jenis APH dan refugia perlu terus dilakukan di tingkat petani agar dapat menekan OPT secara alami dan ramah lingkungan.

Kegiatan perbanyakkan bahan APH-Refugia Tahun 2020 direncanakan sebanyak 86 unit dengan pagu anggaran Rp. 1.883.560.000 yang tersebar di 31 provinsi. Realisasi kegiatan perbanyakkan bahan APH-Refugia sampai dengan akhir Tahun 2020 sejumlah 86 unit (100%) dengan serapan

anggaran sebesar Rp. 1.882.305.400 (99,93%) dari yang direncanakan. Target dan realisasi kegiatan perbanyak bahan APH-refugia Tahun 2020 dibandingkan dengan kegiatan serupa Tahun 2019 lebih rendah 1,14% (realisasi kegiatan perbanyak bahan APH-refugia Tahun 2019 sebanyak 87 unit). Target dan realisasi kegiatan perbanyak bahan APH-Refugia dapat dilihat pada Lampiran 21.

#### f. Rumah Burung Hantu

Burung hantu merupakan salah satu burung karnivora yang aktif pada malam hari (*nocturnal*) dan merupakan pemburu tikus yang handal, sehingga dapat berperan menjadi predator alami yang efektif mengendalikan hama tikus. Burung hantu yang efektif mengendalikan tikus berasal dari Famili Tytonidae, salah satunya dari genus *Tyto* (*Tyto alba*). Serangan hama tikus di beberapa wilayah sentra padi sangat merugikan, bahkan beberapa diantaranya menyebabkan puso, oleh karena itu harus terus dicari alternatif cara pengendaliannya yang efektif dan efisien. Penggunaan burung hantu sebagai predator pengendali hama tikus sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah dengan hasil yang memuaskan. Dengan demikian perlu dikembangkan kegiatan yang dapat memfasilitasi konservasi dan pemberdayaan burung hantu sebagai pengendali hama tikus. Kegiatan yang dapat mendukung upaya konservasi burung hantu sebagai predator hama tikus adalah perbanyak rumah burung hantu (Rubuha). Perbanyak Rubuha di wilayah-wilayah sentra produksi pangan bertujuan untuk meningkatkan fasilitasi pemberdayaan burung hantu sebagai agen pengendali hama tikus.

Kegiatan Perbanyak Rumah Burung Hantu (Rubuha) dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian hama tikus yang aman, ramah lingkungan dan efisien. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membuat rumah burung hantu yang ditempatkan di daerah endemis serangan tikus dan mempunyai potensi populasi burung hantu. Realisasi perbanyak rubuha, tersebar di 16 provinsi, sampai dengan akhir Tahun 2020 sebanyak 774 unit (99,23% dari target 780 unit) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.547.750.000 (99,21% dari pagu Rp. 1.560.000.000). Target dan realisasi kegiatan perbanyak rumah burung hantu dapat dilihat pada Lampiran 22.

Perbanyak rubuha Tahun 2020 tidak terealisasi 6 (enam) unit, yang di alokasikan di Provinsi Kalimantan, karena ada penolakan dari masyarakat peternak burung walet di wilayah tersebut. Kegiatan perbanyak rubuha Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan kegiatan sejenis pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 246,66% (realisasi Tahun 2019 sebesar 225 unit dengan anggaran Rp. 450.000.000).

#### **g. Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH)**

Agens Pengendali Hayati (APH) sebagai bahan pengendali OPT harus tersedia di lapangan dan mudah diakses oleh petani atau kelompok tani pengguna. Oleh karena itu, perbanyak APH harus ada di tingkat lapang/kelompok tani agar mudah di dapatkan oleh petani untuk mengendalikan OPT yang menyerang usaha taninya. Untuk mendukung pengembangan APH dan ketersediaanya di tingkat lapang, maka perlu dilakukan kegiatan yang mendukung penguatan layanan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) dalam menyediakan APH. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan untuk penguatan sarana produksi PPAH agar aktif melakukan kegiatan pengembangan dan perbanyak APH yang dibutuhkan petani atau kelompok tani disekitarnya.

Pos pelayanan agens hayati (PPAH) merupakan lembaga yang bertugas menyediakan agens hayati sebagai bahan pengendali OPT di tingkat lapang. Penguatan kegiatan pengendalian OPT dengan pemberdayaan PPAH dilakukan melalui kegiatan pemberian bantuan dana untuk operasional perbanyak agens hayati merupakan langkah strategis untuk semakin mendekatkan pelayanan PPAH kepada para petani dalam penyediaan bahan pengendali hama yang aman dan ramah lingkungan (APH). Pada Tahun 2020 kegiatan penguatan PPAH direncanakan sebanyak 77 unit dengan pagu anggaran Rp. 770.000.000,- yang tersebar di 23 provinsi yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Realisasi Kegiatan Peenguatan PPAH ini sampai akhir periode Tahun anggaran 2020 sejumlah 77 unit (100%) dengan

serapan anggaran Rp. 769.000.000,- (99,87%). Target dan realisasi kegiatan penguatan sarana produksi PPAH dapat dilihat pada Lampiran 23. Kegiatan penguatan PPAH Tahun 2020 dibandingkan dengan kegiatan serupa Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 142,42 persen (alokasi dan realisasi kegiatan PPAH Tahun 2019 sebesar 30 unit dengan anggaran Rp. 300.000.000,-).

#### **h. Pompa Air**

Upaya penanganan DPI (banjir/kekeringan) pada tanaman pangan dilakukan melalui bantuan sarana penanganan DPI, yang diberikan dalam bentuk barang yaitu pompa air dan bantuan transfer uang yang disalurkan ke rekening kelompok tani untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan spesifik lokasi, berdasarkan surat usulan dari masing-masing daerah. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong petani untuk tetap melakukan budidaya tanaman pangan di lokasi rawan terkena DPI (kekeringan/banjir) serta mengoptimalkan gerakan percepatan tanam.

Bantuan pompa air dialokasikan ke 29 provinsi sejumlah 4.815 unit, bantuan pengadaan sumur suntik sebanyak 140 paket yang alokasinya tersebar di 8 (delapan) provinsi, dan sarana pengaliran air sebanyak 18 paket tersebar di 4 (empat) provinsi. Realisasi kegiatan bantuan pompa air mencapai 4.815 unit (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.685.488.703,- (99,87%).

#### **i. Sumur Suntik**

Upaya penanganan DPI (banjir/kekeringan) pada tanaman pangan dilakukan melalui bantuan sarana penanganan DPI, yang diberikan dalam bentuk barang yaitu sumur suntik dan bantuan transfer uang yang disalurkan ke rekening kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam pembuatan sumur suntik sesuai kebutuhan spesifik lokasi, berdasarkan surat usulan dari masing-masing daerah. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong petani untuk tetap melakukan budidaya tanaman pangan di lokasi rawan terkena DPI (kekeringan/banjir) serta mengoptimalkan gerakan percepatan tanam. Realisasi bantuan pengadaan sumur suntik sebanyak 140 paket (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.750.000.000,- (100%). Target dan realisasi kegiatan pengendalian kekeringan (sumur suntik) dapat dilihat pada Lampiran 25.

**j. Sarana Penampung atau Pengaliran Air**

Upaya penanganan DPI (banjir/kekeringan) pada tanaman pangan dilakukan melalui bantuan sarana penampung atau pengaliran air. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong petani untuk tetap melakukan budidaya tanaman pangan di lokasi rawan terkena DPI (kekeringan/banjir) serta mengoptimalkan gerakan percepatan tanam. Realisasi bantuan sarana pengaliran/penampungan air sebanyak 18 paket (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000 (100%). Target dan realisasi kegiatan bantuan sarana penampung atau pengaliran air dapat dilihat pada Lampiran 26.

**k. Pengadaan Sarana Pengendalian OPT**

Kegiatan pengendalian OPT tanaman pangan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung sarana pengendalian yang cukup jumlah dan mutunya serta lokasinya dekat sehingga mudah diperoleh. Sarana pengendalian OPT dapat berupa alat pengendalian seperti: Hand sprayer, Mist blower, pengempos tikus, dan lain-lain. Selain itu sarana pengendalian OPT dapat pula berupa bahan pengendalian seperti pestisida, herbisida, rodentisida, dll. Pada Tahun 2020, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan pengadaan sarana pengendalian OPT dimana pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi melalui Balai proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). Alokasi Pengadaan sarana pengendalian OPT di BPTPH direncanakan sebanyak 35 paket yang tersebar di 27 provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.168.897.000.

Realisasi kegiatan pengadaan sarana pengendalian OPT di BPTPH sampai periode akhir Tahun 2020 sejumlah 35 paket (100%) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 3.151.469.855 (99,45%). Target dan realisasi kegiatan pengadaan sarana pengendalian OPT dapat dilihat pada Lampiran 27.

Pada Tahun 2020, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan pengadaan sarana pengendalian OPT dimana pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi Pengadaan sarana pengendalian OPT Pusat direncanakan mengendalikan lahan pertanian

seluas 279.568 ha yang tersebar di 27 provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.200.040.000.

Realisasi kegiatan pengadaan sarana pengendalian OPT Pusat sampai periode akhir Tahun 2020 mengendalikan lahan pertanian seluas 279.568 ha (100%) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 56.691.469.855 (99,11%).

#### I. Pengadaan Drone

Pemantauan atau monitoring serangan OPT Tanaman Pangan merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan pengendalian OPT. Untuk itu Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan kegiatan pengadaan drone untuk pemantauan OPT dan drone untuk pengendalian OPT. Alokasi pengadaan drone pemantauan OPT sejumlah 22 unit dengan pagu anggaran Rp. 770.000.000. Realisasi pengadaan drone pemantauan OPT sebanyak 22 unit (100%) dengan realisasi anggaran Rp. 611.310.755 (79,39%). Pengadaan drone pengendalian OPT dialokasikan 1 unit, dengan anggaran Rp. 199.500.000. Realisasi kegiatan pengadaan drone pengendalian OPT adalah 1 unit (100%) dengan serapan anggaran Rp. 119.100.000 (99,80%).

#### m. Pengadaan Hand Sprayer

Pelaksanaan pengendalian OPT memerlukan dukungan sarana pengendalian, yang salah satunya adalah sarana untuk mengaplikasikan bahan pengendali OPT dengan formulasi cair yaitu dengan alat semprot (Hand Sprayer). Pada Tahun 2020 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan kegiatan pengadaan Hand Sprayer sebagai salah satu pendukung kegiatan pengendalian OPT. Alokasi pengadaan Hand Sprayer Tahun 2020 sejumlah 2.000 unit dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000. Realisasi kegiatan pengadaan Hand Sprayer sejumlah 2.000 unit (100%) dengan serapan anggaran Rp. 1.000.000.000 (100%).

#### n. Pengadaan Kandang Penangkaran Burung Hantu

Konservasi dan pemberdayaan burung hantu *Tyto alba* sebagai agen pengendali (predator) hama tikus memerlukan dukungan sarana perkembangbiakan. Salah satu sarana pendukungnya adalah berupa kandang penangkaran, yang dapat berfungsi sebagai tempat

perkembangbiakan burung hantu maupun tempat singah untuk merawat burung hantu di alam yang terkena gangguan (terjelat benang layang, jatuh saat latihan terbang bagi anak burung hantu dan lain-lain). Tahun 2020, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan kandang penangkaran burung hantu sebanyak 5 unit di 5 wilayah kabupaten (Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon) dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000. Realisasi kegiatan penangkaran burung hantu sejumlah 5 unit (100%) dengan serapan anggaran Rp. 250.000.000 (100 %).

#### **o. Kegiatan Padat Karya**

Pengendalian OPT dan penanganan DPI tanaman pangan merupakan upaya pengamanan produksi yang harus dilakukan. Pada Tahun 2020 bersamaan dengan terjadinya pandemi wabah penyakit Covid-19 petani juga diharuskan untuk tetap melakukan pengendalian OPT dan Mitigasi DPI di lahan usaha taninya. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan gerakan pengendalian OPT dan Mitigasi DPI Padat Karya dalam rangka membantu petani dalam masa pandemi ini. Gerakan OPT dan Mitigasi DPI Padat Karya ini bertujuan untuk mengamankan produksi pangan dan sekaligus membantu petani/masyarakat di lingkungan pertanian untuk mengurangi tekanan dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

- Kegiatan gerakan pengendalian OPT Padat Karya Tahun 2020 direncanakan seluas 27.460 ha dengan pagu anggaran Rp. 10.984.000.000,- yang tersebar di 23 provinsi. Realisasi kegiatan gerakan pengendalian OPT Padat Karya Tahun 2020 seluas 27.125 ha (100%) dengan serapan anggaran Rp. 10.984.000.000 (100%). Target dan realisasi kegiatan gerakan pengendalian OPT Padat Karya Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 27-28.
- Mitigasi DPI padat karya terdiri dari bantuan berupa BBM untuk pompanisasi saat olah tanah maupun pengawalan *standing crops*, uang saku/transportasi, dan biaya mobilisasi alsin (pompa air). Kegiatan ini dialokasikan di 25 Provinsi pada lokasi yang rawan terkena DPI khususnya kekeringan. Realisasi fisik kegiatan padat karya penanganan DPI seluas 19.107 ha atau sebesar 96,54% dari target seluas 20.000 ha,

realisasi anggaran sebesar Rp. 6.292.613.143,- atau sebesar 82,80% dari target sebesar Rp. 7.600.000.000,-. Target dan realisasi kegiatan gerakan pengendalian OPT Padat Karya DPI Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 27-29.

**p. Pengadaan Pestisida dan Pestisida Biologi**

Pelaksanaan pengendalian OPT memerlukan dukungan sarana pengendalian, yang salah satunya adalah bahan pengendali OPT, diantaranya pestisida dan pestisida biologi. Pada Tahun 2020 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan pengadaan pestisida dan pestisida biologi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT dan pengamanan produksi pangan. Alokasi pengadaan pestisida Tahun 2020 adalah 1 paket dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000.000,-. Realisasi kegiatan pengadaan pestisida sebanyak 1 paket (100%) dengan serapan anggaran Rp. 9.995.390.000,- (99,95%). Pengadaan pestisida biologi dialokasikan untuk lahan seluas 18.500 ha dengan pagu anggaran Rp. 3.700.000.000,-. Realisasi kegiatan pengadaan pestisida biologi untuk lahan seluas 18.500 ha dengan serapan anggaran Rp. 3.469.865.000,- (93,78%).

**q. Pengadaan Pestisida**

Pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida merupakan alternatif terakhir jika metode lain tidak dapat menangani serangan OPT. Pestisida sebagai bahan pengendali OPT harus mudah dijangkau oleh petani sehingga tindakan pengendalian dapat lebih efisien dan cepat dilaksanakan. Berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh daerah (provinsi), maka Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan kegiatan pengadaan pestisida dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Herbisida

Herbisida merupakan bahan pengendali gulma yang digunakan untuk mengendalikan gulma/rumput/tanaman pengganggu tumbuhan yang diaplikasikan pra tanam untuk pembukaan lahan pertanaman baru. Pada Tahun 2020 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan pengadaan herbisida untuk lahan seluas 4.167 ha dengan pagu anggaran Rp. 500.040.000. Realisasi pengadaan herbisida ini untuk lahan

seluas 4.167 ha (100%) dengan serapan anggaran Rp. 499.951.000 (99,98%).

- Pengadaan Pestisida 2 kg/liter per hektar

Pada Tahun 2020 Direktorat Perlindungan Tanaman mengalokasikan pengadaan pestisida bantuan 2 kg/liter per ha untuk lahan seluas 51.000 ha dengan alokasi anggaran Rp. 10.200.000.000. Realisasi kegiatan pengadaan bantuan pestisida ini untuk lahan seluas 51.000 ha (100%) dengan serapan anggaran 9.974.492.500 (97,79%).

- Pengadaan Insektidia untuk Ulat Grayak *Spodoptera frugiperda* (1 kg/liter per hektar)

Pada Tahun 2020 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan kegiatan pengadaan pestisida (insektisida) pengendali ulat grayak *Spodoptera frugiperda* 1kg/lt per ha untuk lahan seluas 400 ha dengan pagu anggaran Rp. 1.540.000.000. Realisasi kegiatan pengadaan pestisida untuk ulat grayak *S. frugiperda* ini untuk lahan seluas 400 ha dengan serapan anggaran Rp. 1.539.150.000 (99,94%).

- Pengadaan Rodentisida Pengasapan (25 batang/hektar)

Pada Tahun 2020 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan pengadaan pestisida (Rodentisida) bahan pengasapan untuk mengendalikan hama tikus 25 batang/ha untuk luasan lahan 5.500 ha dengan pagu anggaran Rp. 1.100.000.000. Realisasi kegiatan pengadaan rodentisida ini untuk lahan seluas 5.500 ha (100%) dengan serapan anggaran Rp. 1.095.725.000 (99,61%).

- Pengadaan pestisida / moluskisida untuk keong mas

Pada Tahun 2020 untuk mendukung pengendalian hama keong mas, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan 1 paket kegiatan pengadaan bantuan pestisida pengendali koeng mas (moluskisida) dengan pagu anggaran Rp. 160.000.000. Realisasi kegiatan pengadaan bantuan pestisida untuk keong mas ini sebesar 1 paket (100%) dengan serapan anggaran Rp. 158.760.000 (99,23%).

Pada Tahun 2020 untuk menguatkan kegiatan pengendalian OPT Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan kegiatan bantuan sarana pengendalian OPT berupa pestisida yang diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Alokasi bantuan pestisida ini untuk luas lahan 150.000 ha dengan pagu anggaran Rp 30.000.000.000. Realiasi kegiatan pengadaan pestisida ini untuk lahan seluas 150.000 ha dengan serapan anggaran Rp. 29.958.555.000 (99,86%).

**r. Pengadaan Pestisida dan Herbisida Food Estate Kabupaten**

**SumbaTengah dan Buru**

Pada Tahun 2020 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan kegiatan pengadaan pestisida dan herbisida untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan area food estate di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Alokasi kegiatan pengadaan Pestisida sebesar 12.000 kg/lt dengan pagu anggaran Rp. 1.200.000.000. Realisasi kegiatan pengadaan pestisida untuk kawasan food estate di Kabupaten Sumba Tengah ini sebesar 12.000 kg/lt dengan serapan anggaran Rp. 1.175.050.000 (97,92%). Alokasi kegiatan pengadaan Herbisida sebesar 6.000 kg/lt dengan pagu anggaran Rp. 360.000.000. Realisasi kegiatan pengadaan herbisida untuk kawasan food estate di Kabupaten Sumba Tengah ini sebesar 6.000 kg/lt dengan serapan anggaran Rp. 308.700.000 (85,75%).

Pada Tahun 2020 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan kegiatan pengadaan pestisida dan herbisida untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan area food estate di Kabupaten Buru, Maluku. Alokasi kegiatan pengadaan Pestisida sebesar 2.000 kg/lt dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000. Realisasi kegiatan pengadaan pestisida untuk kawasan food estate di Kabupaten Buru ini sebesar 2.000 kg/lt dengan serapan anggaran Rp. 199.197.500 (99,60%). Alokasi kegiatan pengadaan Herbisida sebesar 1.000 kg/lt dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000. Realisasi kegiatan pengadaan Herbisida untuk kawasan food estate di Kabupaten Buru ini sebesar 1.000 kg/lt dengan serapan anggaran Rp. 59.950.000 (99,92%).

**s. Pembangunan dan Rehabilitasi Sumur Bor *Solar Cell* dan *Engine Diesel***

Untuk mendukung kegiatan pengembangan *Food Estate* Sumba Tengah serta mengantisipasi kekeringan di lahan pertanaman pangan di lokasi tersebut, dialokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi sumur bor *solar cell* dan sumur bor *engine diesel*. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat mengantisipasi kekeringan dan mengurangi resiko kehilangan hasil akibat kekeringan, sehingga pengembangan kawasan tersebut dapat berjalan optimal sesuai target yang telah direncanakan.

Sumber anggaran berasal dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Alokasi anggaran untuk pembangunan sumur bor *solar cell* sebanyak 10 paket, rehabilitasi sumur bor *solar cell* sebanyak 10 paket, dan rehabilitasi sumur bor *engine diesel* sebanyak 3 (tiga) paket. Realisasi fisik pembangunan sumur bor *solar cell* sebanyak 10 paket (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.625.000.000,- atau 100% dari target, realisasi fisik rehabilitasi sumur bor *solar cell* sebanyak 10 paket (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.575.000.000,- atau 100% dari target, realisasi fisik rehabilitasi sumur bor *engine diesel* sebanyak 3 (tiga) paket dan realisasi anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- atau 100% dari target anggaran. Target dan realisasi kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sumur bor *solar cell* dan *engine diesel* Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 30.

**t. Realisasi Keuangan**

Pada Tahun 2020, pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di pusat didukung dengan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sedangkan di daerah didukung dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA Dana Dekonsentrasi melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).

Jumlah anggaran kegiatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI pada Tahun 2020 adalah Rp. 300.871.322.000. Realisasi anggaran

tahun 2020 mencapai Rp. 296.042.061.297 atau 98,39% dari pagu anggaran (data s.d. Desember 2020).

Realisasi anggaran dari DIPA dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Pertanian Tahun 2020 sebesar Rp. 103.841.613.636 atau 99,11% dari pagu anggaran Rp. 104.778.321.000. Realisasi anggaran pada satker pusat Tahun 2020 sebesar Rp. 192.200.447.661 atau 98,01% dari pagu anggaran Rp. 196.093.001.000.

## B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung penghematan anggaran dalam mencapai output kegiatan, dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK\_ke-i / RVK\_ke-i}{PAK\_ke-i / TVK\_ke-i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

E : Efisiensi	
RVK : Realisasi volume keluaran	
RAK : Realisasi anggaran per keluaran	
TVK : Target volume keluaran	
PAK : Pagu anggaran per keluaran	
n : Jumlah jenis keluaran	

Semakin sedikit anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang maksimal, maka nilai efisiensinya semakin tinggi. Jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian output kegiatan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien, dan begitu pula sebaliknya. Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap capaian output kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020**

No	Keluaran (output)	Satuan keluaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran per Keluaran (RAK)	RAK/RVK	PAK/RVK	1- RAK/RVK/ (PAK/TVK)
1	Pemanjatan Penerapan PTI (Ha)	Ha	4.080	4.678.100.000	4.669.527.566	1.144.492	1.146.593	0.18%	
2	Penerapan Penanganan DPI (ha)	Ha	550	2.553.649.000	2.469.681.000	4.490.329	4.642.998	3.29%	
3	Gerakan Pengendalian OPT (Ha)	Ha	20.083	8.546.422.000	8.423.472.604	41.9.851	425.555	1.34%	
4	Pengujian Mutu Produk Tanaman (LHP/ sertifikat)	LHP/ sertifikat	1.600	1.615	5.034.880.000	4.730.469.935	2.929.084	3.146.800	6.92%
5	Bahan Perbaikan APH/Refugia (Unit)	Unit	86	86	1.883.560.000	1.882.305.400	21.887.272	21.901.860	0,07%
6	Perbaikan Rumah Burung Hantu (Unit)	Unit	780	774	1.560.000.000	1.547.750.000	1.999.677	2.000.000	0,02%
7	Pos Pengembangan Agens Hayati (Unit)	Unit	77	77	770.000.000	769.000.000	9.987.013	10.000.000	0,13%
8	Pompa air (unit)	Unit	4.815	4.815	78.788.000.000	78.685.488.703	16.341.742	16.363.032	0,13%
9	Sumur suntik (paket)	Paket	140	140	1.750.000.000	1.750.000.000	12.500.000	12.500.000	0,00%
10	Sarana pengaliran /Penampung air (paket)	Paket	18	18	900.000.000	900.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00%
11	Sarana Pengendalian OPT Pusat (Ha)	Ha	279.568	279.568	57.200.040.000	56.691.888.500	202.784	204.602	0,89%
	Sarana Pengendalian OPT Daerah (paket)	Paket	35	35	3.168.897.000	3.151.469.855	90.041.996	90.539.914	0,55%
12	Pengadaan drone (unit)	Unit	23	23	969.500.000	810.410.000	35.235.217	42.152.174	16.41%
13	Pengadaan Hand Sprayer (unit)	Unit	2.000	2.000	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000	500.000	0,00%
14	Pengadaan Penangkaran Kandang Burung Hantu (unit)	Unit	5	5	250.000.000	250.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00%
15	Gerdai OPT Padat Karya (Ha)	Ha	27.460	27.460	10.984.000.000	10.984.000.000	400.000	400.000	0,00%
16	Penanganan DPI Padat Karya (Ha)	Ha	20.000	19.107	7.600.000.000	6.292.613.143	329.335	380.000	13,33%
17	Pengadaan Pestisida (paket)	Paket	1	1	10.000.000.000	9.995.390.000	9.995.390.000	10.000.000.000	0,05%
	Pengadaan Pestisida Biologi (Ha)	Ha	18.500	18.500	3.700.000.000	3.469.865.000	187.560	200.000	6,22%
18	Pengadaan Pestisida:								
a.	Bantuan Herbisida (Ha)	Ha	4.167	4.167	500.040.000	499.951.000	119.979	120.000	0,02%
b.	Bantuan Pestisida (2kg/L per Ha) (Ha)	Ha	51.000	51.000	10.200.000.000	9.974.492.500	195.578	200.000	2,21%
c.	Bantuan Insektisida ulat grayak S. frugiperda (1 kg/L per Ha) (Ha)	Ha	400	400	1.540.000.000	1.539.150.000	3.847.875	3.850.000	0,06%
d.	Rodentisida Pengasapan (25 batang/Ha)	Ha	5.500	5.500	1.100.000.000	1.095.725.000	199.223	200.000	0,39%
e.	Bantuan molusksisida (paket) (Ha)	Paket	1	1	160.000.000	158.760.000	158.760.000	160.000.000	0,78%
19	Pengadaan Pestisida dan Herbisida Food Estate Kabupaten Sumba Tengah (kg/L)	kg/L	12.000	12.000	1.200.000.000	1.175.050.000	97.921	100.000	2,08%
	Pengadaan Pestisida dan Herbisida Food Estate Kabupaten Buru (kg/L)	kg/L	6.000	6.000	360.000.000	308.700.000	51.450	60.000	14,25%
20	Pembangunan dan Rehabilitasi Sumur Bor Sola Cell dan Engine Diesel (paket)	Paket	23	23	4.470.000.000	4.470.000.000	194.347.826	194.347.826	0,00%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya pada semua kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 sudah efisien karena semua kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 tidak ada yang memiliki nilai efisiensi negatif.

## C. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

### 1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun 2020 antara lain :

- a. Pandemik Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 lalu, mengakibatkan semua sektor terdampak, termasuk sektor pertanian. Hal ini berdampak terbitnya kebijakan perubahan dan penghematan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah untuk penanganan Covid-19, serta adanya kebijakan pembatasan kegiatan sosial yang berlangsung sampai pertengahan tahun. Hal tersebut di atas, berdampak pelaksanaan kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah jadi terhambat karena musti menunggu terbitnya DIPA baru dan menyesuaikan perubahan anggaran, serta mengikuti aturan kebijakan pembatasan kegiatan sosial.
- b. Jumlah usulan permohonan bantuan dari Provinsi/Kabupaten untuk kegiatan sarana penanganan DPI lebih banyak dari kuota anggaran, serta beragamnya usulan kebutuhan sarana penanganan DPI sesuai kondisi dan ketersediaan air di lapangan, sehingga tidak semua usulan dapat diakomodir/dipenuhi.
- c. Kegiatan padat karya penanganan DPI khususnya kekeringan pada beberapa provinsi dimulai lebih lambat dari yang direncanakan yaitu pada awal terbitnya anggaran tersebut di bulan Juli tahun 2020. Lambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut di beberapa provinsi, karena tujuan awal terbitnya anggaran ini adalah untuk mengantisipasi kekeringan pada Tahun 2020 sekaligus membantu petani yang terdampak Covid-19. Namun berdasarkan data kekeringan Tahun 2020 cenderung dibandingkan Tahun 2019. Di saat yang bersamaan pada bulan Agustus – Oktober, sebagian besar tanaman sudah panen, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana baru berjalan optimal di awal bulan November saat dimulainya olah tanah bagi lahan yang membutuhkan pompanisasi dan pengawalan *standing crops*.

- d. Meningkatnya angka luas serangan OPT terutama dipengaruhi oleh adanya hama baru pada tanaman jagung yaitu *Spodoptera frugiperda* sehingga jumlahnya meningkat 5 (lima) kali lipat jika dibandingkan dengan MT sebelumnya.

## **2. Upaya Tindak Lanjut**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan memberikan solusi terhadap permasalahan di atas antara lain :

- a. Penetapan penerima bantuan berdasarkan prioritas kebutuhan dan data terkena DPI, selanjutnya mengusulkan lagi alokasi anggaran untuk sarana penanganan DPI pada tahun berikutnya.
- b. Mendorong dinas Provinsi/Kabupaten untuk proaktif terhadap identifikasi kebutuhan yang tepat dalam upaya penanganan DPI di lapangan.
- c. Monitoring dan evaluasi yang intensif dan optimal terhadap semua pelaksanaan kegiatan sehingga betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran.
- d. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi mengenai pengendalian hama *S. frugiperda* dan penerapan sistem PHT baik kepada petani maupun petugas di lapangan dan mendorong Petugas di lapangan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kelompok tani dalam rangka pengamatan dini dan pengendalian OPT.

## **IV. PENUTUP**

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja kegiatan perlindungan tanaman pangan yang dilakukan pada tahun 2020 (data OPT/DPI Oktober 2019-September 2020), disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam pengamanan tanaman pangan dari gangguan OPT/DPI selama Tahun 2020 termasuk dalam kategori Sangat Berhasil dengan capaian IK OPT sebesar 131,4% dan DPI sebesar 124,2%. Keberhasilan tersebut juga menjadi indikasi adanya manfaat dari kegiatan pengamatan, pencegahan dan pengendalian serangan OPT/DPI. Meskipun beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya wabah pandemi Covid-19, namun perkembangan OPT/DPI di lapangan masih dalam kondisi yang dapat dikendalikan.

Realisasi kegiatan utama perlindungan tanaman pangan pada Tahun 2020 antara lain: PPHT padi, jagung, kedelai/kacang tanah/kacang hijau dan ubi kayu (100%), gerakan pengendalian padi, jagung dan kedelai (99,9%), pengujian mutu produk tanaman (100,94%), perbanyakkan APH/refugia (100%), perbanyakkan rumah burung hantu (99,23%), dan PPAH (99,87%). Pemberian bantuan dalam rangka penanganan DPI yaitu pompa air (100%), sumur suntik (100%), sarana pengaliran/penampungan air (100%). Bantuan pengadaan sarana pengendalian OPT (pestisida) sudah terlaksana 100% (pusat) dan 100% (daerah). Pengadaan drone terlaksana 100%. Salah satu kegiatan bantuan dalam rangka pandemi Covid 19, yaitu gerakan pengendalian OPT padat karya sudah terlaksana 100% sedangkan untuk penanganan DPI padat karya 95,54%.

Selain hasil dari pelaksanaan beberapa kegiatan utama, keberhasilan pengamanan tanaman pangan dari gangguan OPT/DPI pada tahun 2020 juga tak lepas dari peran aktif seluruh petugas baik di pusat maupun daerah dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap para petani untuk senantiasa mengedepankan prinsip budidaya tanaman sehat, pengelolaan hama terpadu dan respon cepat terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Peran aktif petugas POPT di lapangan sangat besar dalam pengawalan pertanaman meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, kelembagaan perlindungan turut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan. Laboratorium pengujian mutu produk juga berperan

dalam memastikan sarana pengendali OPT yang tersedia selalu terjamin mutu dan efektifitasnya. Realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp. 296.042.061.297 atau 98,39% dari pagu anggaran sebesar Rp. 300.871.322.000 baik pusat maupun daerah.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi pada Tahun 2020 harus segera diselesaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 dalam rangka mempertahankan capaian kinerja. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain pelaksanaan kegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat; mendorong dinas Provinsi/Kabupaten untuk proaktif terhadap identifikasi kebutuhan yang tepat dalam upaya penanganan OPT/DPI di lapangan; melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif dan optimal terhadap semua pelaksanaan kegiatan sehingga betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi mengenai pengendalian OPT khususnya hama *S. frugiperda* dan penerapan sistem PHT baik kepada petani maupun petugas di lapangan.

## **LAMPIRAN**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA TANAMAN PANGAN  
MUSIM TANAM 2014/2015 – 2019/2020 dan RERATA 5 MT**

**Lampiran 1**

No	Tahun	Padi		Jagung		Kedelai		Kacang Tanah		Kacang Hijau		Ubi Kayu		Ubi Jalar				
		Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		
		Terkena	Puso (Ha)	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso (Ha)	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso (Ha)	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso (Ha)	Luasan (Ha)	Persentase (%)	
1	2013/2014	476.238	2.472	473.766	99,48	26.832	140	26.693	99,64	10.324	29	10.295	99,72	2.936	3	2.933	99,89	1.112
2	2014/2015	379.272	7.018	372.254	98,15	24.299	86	24.213	99,64	1.358	-	1.358	100,00	2.377	1	2.377	99,96	1.049
3	2015/2016	391.798	4.028	387.770	98,97	23.752	131	23.621	99,45	4.022	6	4.016	99,85	2.486	5	2.481	99,80	915
4	2016/2017	451.455	9.453	442.002	97,91	24.753	206	24.548	99,17	2.043	1	2.042	99,95	1.323	-	1.323	100,00	539
5	2017/2018	336.753	3.310	323.443	98,99	24.156	197	23.999	99,18	3.573	99	3.474	97,23	1.608	-	1.608	100,00	400
<b>Rerata (13/14-17/18)</b>		<b>405.103</b>	<b>5.256</b>	<b>399.847</b>	<b>98,70</b>	<b>24.767</b>	<b>152</b>	<b>24.615</b>	<b>99,39</b>	<b>4.264</b>	<b>27</b>	<b>4.237</b>	<b>99,37</b>	<b>2.146</b>	<b>2</b>	<b>2.144</b>	<b>99,92</b>	<b>803</b>
5	2018/2019	310.833	5.574	305.259	98,21	39.870	115	39.755	99,71	1.905	24	1.881	98,74	1.350	4	1.346	99,71	444
6	2019/2020	386.692	7.070	379.622	98,17	168.454	1.099	167.355	99,35	1.113	23	1.090	97,93	1.793	1	1.792	99,94	672

Data s.d 12 November 2020

**Lampiran 2.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN PADI  
MT 2019/2020**

Ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	9.788	4	9.784	99,96
2	Sumatera Utara	13.490	14	13.476	99,90
3	Sumatera Barat	3.107	163	2.944	94,76
4	R i a u	3.303	2	3.301	99,94
5	J a m b i	1.777	49	1.728	97,23
6	Sumatera Selatan	19.080	172	18.908	99,10
7	Bengkulu	5.005	34	4.971	99,33
8	Lampung	34.912	481	34.431	98,62
9	Kep. Bangka Belitung	2.110	213	1.896	89,88
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	258	-	258	100,00
12	Jawa Barat	61.626	693	60.933	98,88
13	Jawa Tengah	64.386	543	63.844	99,16
14	DI Yogyakarta	9.808	33	9.775	99,67
15	Jawa Timur	48.721	2.963	45.758	93,92
16	Banten	7.660	247	7.413	96,77
17	B a l i	4.765	266	4.499	94,42
18	Nusa Tenggara Barat	6.138	-	6.138	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	2.452	27	2.425	98,90
20	Kalimantan Barat	7.281	69	7.213	99,06
21	Kalimantan Tengah	2.251	165	2.086	92,66
22	Kalimantan Selatan	1.279	17	1.262	98,66
23	Kalimantan Timur	8.460	72	8.388	99,15
24	Kalimantan Utara	93	-	93	100,00
25	Sulawesi Utara	2.259	57	2.202	97,49
26	Sulawesi Tengah	12.263	95	12.168	99,23
27	Sulawesi Selatan	14.913	86	14.828	99,42
28	Sulawesi Tenggara	21.351	572	20.780	97,32
29	Gorontalo	2.375	28	2.347	98,84
30	Sulawesi Barat	9.142	1	9.141	99,99
31	M a l u k u	3.530	-	3.530	100,00
32	Maluku Utara	923	-	923	100,00
33	Papua Barat	1.026	6	1.020	99,42
34	Papua	1.159	-	1.159	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>386.692</b>	<b>7.070</b>	<b>379.622</b>	<b>98,17</b>

Data periode laporan 12 November 2020

**Lampiran 3.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN JAGUNG**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	3.119	-	3.119	100,00
2	Sumatera Utara	7.941	-	7.941	100,00
3	Sumatera Barat	111	-	111	100,00
4	Riau	695	-	695	100,00
5	Jambi	363	5	358	98,58
6	Sumatera Selatan	3.151	1	3.150	99,97
7	Bengkulu	471	-	471	100,00
8	Lampung	15.441	-	15.441	100,00
9	Kep. Bangka Belitung	4	-	4	100,00
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	2.727	9	2.718	99,67
13	Jawa Tengah	10.875	104	10.771	99,04
14	DI Yogyakarta	684	-	684	100,00
15	Jawa Timur	31.638	295	31.343	99,07
16	Banten	706	-	706	100,00
17	Bali	654	-	654	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	12.287	-	12.287	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	26.856	2	26.854	99,99
20	Kalimantan Barat	1.123	12	1.111	98,93
21	Kalimantan Tengah	150	2	148	98,80
22	Kalimantan Selatan	289	4	285	98,62
23	Kalimantan Timur	2.045	-	2.045	100,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	3.131	-	3.131	100,00
26	Sulawesi Tengah	5.352	23	5.329	99,57
27	Sulawesi Selatan	7.754	2	7.752	99,97
28	Sulawesi Tenggara	7.286	368	6.918	94,95
29	Gorontalo	14.312	256	14.056	98,21
30	Sulawesi Barat	8.151	1	8.151	99,99
31	Maluku	25	-	25	100,00
32	Maluku Utara	231	16	215	93,21
33	Papua Barat	183	-	183	100,00
34	Papua	700	-	700	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>168.454</b>	<b>1.099</b>	<b>167.355</b>	<b>99,35</b>

Data periode laporan 12 November 2020

**Lampiran 4.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KEDELAI**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	27	-	27	100,00
2	Sumatera Utara	116	-	116	100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!
4	Riau	13	-	13	100,00
5	Jambi	20	-	20	100,00
6	Sumatera Selatan	2	-	2	100,00
7	Bengkulu	-	-	-	#DIV/0!
8	Lampung	3	-	3	100,00
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	50	-	50	100,00
13	Jawa Tengah	198	-	198	100,00
14	DI Yogyakarta	49	-	49	100,00
15	Jawa Timur	88	23	65	73,91
16	Banten	3	-	3	100,00
17	Bali	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	114	-	114	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	9	-	9	100,00
20	Kalimantan Barat	2	-	2	100,00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	5	-	5	100,00
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	26	-	26	100,00
26	Sulawesi Tengah	254	-	254	100,00
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	#DIV/0!
28	Sulawesi Tenggara	34	-	34	100,00
29	Gorontalo	11	-	11	100,00
30	Sulawesi Barat	87	-	87	100,00
31	Maluku	-	-	-	#DIV/0!
32	Maluku Utara	-	-	-	#DIV/0!
33	Papua Barat	2	-	2	100,00
34	Papua	2	-	2	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.113</b>	<b>23</b>	<b>1.090</b>	<b>97,93</b>

Data periode laporan 12 November 2020

**Lampiran 5.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KACANG TANAH**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	49	-	49	100,00
2	Sumatera Utara	184	-	184	100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!
4	R i a u	18	-	18	100,00
5	J a m b i	9	-	9	100,00
6	Sumatera Selatan	17	-	17	100,00
7	Bengkulu	10	-	10	100,00
8	Lampung	-	-	-	#DIV/0!
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	32	-	32	100,00
13	Jawa Tengah	125	-	125	100,00
14	DI Yogyakarta	180	-	180	100,00
15	Jawa Timur	680	-	680	100,00
16	Banten	-	-	-	#DIV/0!
17	B a l i	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	117	-	117	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	-	22	100,00
20	Kalimantan Barat	37	-	37	100,00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	#DIV/0!
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	104	-	104	100,00
26	Sulawesi Tengah	60	-	60	100,00
27	Sulawesi Selatan	49	-	49	100,00
28	Sulawesi Tenggara	20	-	20	100,00
29	Gorontalo	6	1	5	82,46
30	Sulawesi Barat	44	-	44	100,00
31	M a l u k u	0	-	0	100,00
32	Maluku Utara	2	-	2	100,00
33	Papua Barat	4	-	4	100,00
34	Papua	27	-	27	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.793</b>	<b>1</b>	<b>1.792</b>	<b>99,94</b>

Data periode laporan 12 November 2020

**Lampiran 6.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KACANG HIJAU**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	2	-	2	100,00
2	Sumatera Utara	2	-	2	100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!
4	R i a u	1	-	1	100,00
5	J a m b i	-	-	-	#DIV/0!
6	Sumatera Selatan	-	-	-	#DIV/0!
7	Bengkulu	-	-	-	#DIV/0!
8	Lampung	-	-	-	#DIV/0!
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	1	-	1	100,00
13	Jawa Tengah	484	-	484	100,00
14	DI Yogyakarta	-	-	-	#DIV/0!
15	Jawa Timur	129	-	129	100,00
16	Banten	-	-	-	#DIV/0!
17	B a l i	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	#DIV/0!
19	Nusa Tenggara Timur	3	-	3	100,00
20	Kalimantan Barat	20	-	20	100,00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	#DIV/0!
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	-	-	-	#DIV/0!
26	Sulawesi Tengah	2	-	2	100,00
27	Sulawesi Selatan	8	-	8	100,00
28	Sulawesi Tenggara	4	-	4	100,00
29	Gorontalo	3	-	3	100,00
30	Sulawesi Barat	13	-	13	100,00
31	M a l u k u	-	-	-	#DIV/0!
32	Maluku Utara	-	-	-	#DIV/0!
33	Papua Barat	-	-	-	#DIV/0!
34	Papua	-	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		<b>672</b>	-	<b>672</b>	<b>100,00</b>

Data periode laporan 12 November 2020

**Lampiran 7.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN UBI KAYU  
MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	25	-	25	100,00
2	Sumatera Utara	194	-	194	100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!
4	Riau	131	8	123	93,89
5	Jambi	13	0	13	98,87
6	Sumatera Selatan	1	-	1	100,00
7	Bengkulu	2	-	2	100,00
8	Lampung	18	-	18	100,00
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	39	-	39	100,00
13	Jawa Tengah	74	-	74	100,00
14	DI Yogyakarta	18	-	18	100,00
15	Jawa Timur	358	-	358	100,00
16	Banten	-	-	-	#DIV/0!
17	Bali	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	#DIV/0!
19	Nusa Tenggara Timur	41	-	41	100,00
20	Kalimantan Barat	15	-	15	100,00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	#DIV/0!
23	Kalimantan Timur	50	-	50	100,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	189	-	189	100,00
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	#DIV/0!
27	Sulawesi Selatan	24	-	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	119	-	119	100,00
29	Gorontalo	-	-	-	#DIV/0!
30	Sulawesi Barat	48	-	48	100,00
31	Maluku	8	-	8	100,00
32	Maluku Utara	1	-	1	100,00
33	Papua Barat	6	-	6	100,00
34	Papua	5	-	5	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.378</b>	<b>8</b>	<b>1.370</b>	<b>99,41</b>

Data periode laporan 12 November 2020

**Lampiran 8.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN UBI JALAR**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	8	-	8	100,00
2	Sumatera Utara	35	-	35	100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!
4	Riau	-	-	-	#DIV/0!
5	Jambi	16	-	16	100,00
6	Sumatera Selatan	7	-	7	100,00
7	Bengkulu	6	-	6	100,00
8	Lampung	-	-	-	#DIV/0!
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	6	-	6	100,00
13	Jawa Tengah	17	-	17	100,00
14	DI Yogyakarta	-	-	-	#DIV/0!
15	Jawa Timur	10	-	10	100,00
16	Banten	-	-	-	#DIV/0!
17	Bali	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	#DIV/0!
19	Nusa Tenggara Timur	3	-	3	100,00
20	Kalimantan Barat	2	-	2	100,00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	#DIV/0!
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	151	-	151	100,00
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	#DIV/0!
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	#DIV/0!
28	Sulawesi Tenggara	13	-	13	100,00
29	Gorontalo	-	-	-	#DIV/0!
30	Sulawesi Barat	19	-	19	100,00
31	Maluku	1	-	1	100,00
32	Maluku Utara	-	-	-	#DIV/0!
33	Papua Barat	29	-	29	100,00
34	Papua	-	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		<b>323</b>	<b>-</b>	<b>323</b>	<b>100,00</b>

Data periode laporan 12 November 2020

**LUAS BANJIR PADA TANAMAN PANGAN  
MUSIM TANAM 2014/2015 – 2019/2020 dan RERATA 5 MT**

**Lampiran 9**

No	Tahun	Padi			Jagung			Kedelai			Kacang Tanah			Kaong Hijau			Ubi Kayu			Ubi Jalar								
		Luas Serangan (LS)	Areal Terselamatkan	Luasan (%)	Luas Serangan (LS)	Areal Terselamatkan	Luasan (%)	Puso	Luas Serangan (LS)	Areal Terselamatkan	Luasan (%)	Puso	Luas Serangan (LS)	Areal Terselamatkan	Luasan (%)	Puso	Luas Serangan (LS)	Areal Terselamatkan	Luasan (%)	Puso	Luas Serangan (LS)	Areal Terselamatkan	Luasan (%)					
1	2013/2014	384.714	143.518	62,69	11.187	3.411	7,776	69.51	3.847	1.500	2,348	61.02	213	45	168	78.83	37	34	3	8,09	191	58	133	69,76	111	-		
2	2014/2015	119.536	40.173	33,95	4.183	77.62	5.778	1.595	72.40	2.777	2.178	59	21.58	165	19	146	88.24	100	4	96	96,01	122	79	44	35,77	4	1	3
3	2015/2016	188.153	45.422	152.731	77.08	15.222	4.749	10.472	68.80	12.251	5.885	6.365	51.96	3.224	1.396	1.828	56,70	8.903	589	8,315	93,39	689	144	505	79,09	30	30	-
4	2016/2017	258.037	82.016	176.021	68,22	34.416	14.812	19.604	56,96	9.264	4.844	4.421	47,72	557	332	225	40,43	804	261	543	67,53	577	214	362	62,83	9	2	7
5	2017/2018	186.396	61.948	134.448	68,46	11.590	5.125	6.466	55,78	2.312	1.278	1.034	44,71	198	94	104	52,55	47	9	38	80,65	917	359	558	60,85	16	15	1
<b>Rerata (13/14-17/18)</b>		<b>243.367</b>	<b>74.615</b>	<b>168.752</b>	<b>69,34</b>	<b>15.639</b>	<b>5.938</b>	<b>9.700</b>	<b>62,03</b>	<b>6.090</b>	<b>3.137</b>	<b>2.953</b>	<b>48,49</b>	<b>871</b>	<b>377</b>	<b>494</b>	<b>56,71</b>	<b>1.978</b>	<b>179</b>	<b>1.799</b>	<b>90,94</b>	<b>499</b>	<b>171</b>	<b>328</b>	<b>65,79</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
6	2018/2019	190.986	61.406	129.581	67,85	16.214	7.009	9.205	56,77	880	711	170	19,26	160	20	141	87,79	17	-	17	100,00	28	9	19	68,59	-	-	#DIV/0!
7	2019/2020	206.359	67.402	138.956	67,34	9.936	2.444	7.492	75,40	363	116	247	67,96	37	17	21	55,03	58	23	35	60,61	100	-	100	100,00	-	-	#DIV/0!

Data Periode laporan 12 November 2020

**Lampiran 10**
**LUAS KEKERINGAN PADA TANAMAN PANGAN**  
**MUSIM TANAM 2014/2015 – 2019/2020 dan RERATA 5 MT**

No	Tahun	Padi			Jagung			Kacang Tanah			Kacang Hijau			Ubi Kayu		
		Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan
		Luasan	Persentase	(Ha)	Luasan	Persentase	(Ha)	Luasan	Persentase	(Ha)	Luasan	Persentase	(Ha)	Luasan	Persentase	(Ha)
1	2013/2014	207.617	31.430	176.187	84.86	21.628	1.527	19.700	91.09	4.310	307	4.003	92.89	110	1	110
2	2014/2015	597.312	215.330	381.982	65.95	67.498	21.971	45.527	67.45	14.673	4.522	10.151	69.18	962	170	792
3	2015/2016	93.377	16.913	76.464	81.89	88.584	22.393	66.191	74.72	3.779	958	74.65	531	3	528	99.43
4	2016/2017	88.313	21.538	66.775	75.61	37.490	4.144	33.347	88.95	216	84	132	61.11	79	79	100.00
5	2017/2018	192.247	36.270	155.977	81.13	61.423	1.969	59.154	96.79	2.428	463	1.965	80.93	24	12	48.94
<b>Rerata (13/14-17/18)</b>		<b>235.773</b>	<b>64.296</b>	<b>171.477</b>	<b>72.73</b>	<b>55.325</b>	<b>10.481</b>	<b>44.844</b>	<b>81.06</b>	<b>1.267</b>	<b>3.814</b>	<b>75.07</b>	<b>341</b>	<b>37</b>	<b>304</b>	<b>89.11</b>
6	2018/2019	346.133	123.334	222.800	64.37	41.124	4.835	36.288	88.24	1.298	162	1.136	87.51	7.503	155	7.349
7	2019/2020	82.316	15.682	66.634	80.95	55.557	5.152	50.405	90.73	277	55	222	80.14	1.076	111	965

Data Periode Laporan 12 November 2020

**Lampiran 11.**

**LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN PADI  
MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	10.643	757	9.886	92,89	18.530	3.536	14.994	80,92
2	Sumatera Utara	10.989	2.695	8.294	75,48	5.651	124	5.527	97,81
3	Sumatera Barat	3.808	799	3.008	79,01	109	11	98	90,32
4	Riau	3.482	1.416	2.066	59,34	988	139	849	85,93
5	Jambi	5.922	3.109	2.813	47,50	433	5	428	98,85
6	Sumatera Selatan	11.548	7.781	3.768	32,62	394	-	394	100,00
7	Bengkulu	-	-	-	#DIV/0!	244	51	193	79,10
8	Lampung	9.862	3.657	6.205	62,92	1.950	1.257	693	35,54
9	Kep. Bangka Belitung	7	-	7	100,00	3	-	3	100,00
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	36.732	13.078	23.654	64,40	13.597	2.990	10.607	78,01
13	Jawa Tengah	20.198	2.745	17.453	86,41	11.781	2.038	9.743	82,70
14	DI Yogyakarta	1.334	83	1.251	93,80	4.795	1.870	2.925	61,00
15	Jawa Timur	12.305	1.052	11.252	91,45	5.249	626	4.623	88,07
16	Banten	6.328	2.085	4.243	67,05	2.615	108	2.507	95,87
17	Bali	95	2	93	97,64	368	-	368	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	25	-	25	100,00	6.919	583	6.336	91,57
19	Nusa Tenggara Timur	218	103	115	52,64	2.224	1.081	1.143	51,39
20	Kalimantan Barat	3.290	319	2.971	90,30	93	-	93	100,00
21	Kalimantan Tengah	2.567	5	2.563	99,82	59	-	59	100,00
22	Kalimantan Selatan	17.844	6.299	11.545	64,70	365	15	350	95,89
23	Kalimantan Timur	1.285	344	941	73,22	155	5	150	96,77
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	1.046	77	969	92,64	-	-	-	#DIV/0!
26	Sulawesi Tengah	4.461	1.852	2.608	58,47	911	640	271	29,77
27	Sulawesi Selatan	36.824	17.236	19.588	53,19	3.360	495	2.865	85,27
28	Sulawesi Tenggara	4.251	1.853	2.397	56,40	983	102	881	89,62
29	Gorontalo	1.068	40	1.028	96,23	366	-	366	100,00
30	Sulawesi Barat	107	2	106	98,60	155	-	155	100,00
31	Maluku	45	8	38	83,33	-	-	-	#DIV/0!
32	Maluku Utara	78	7	72	91,67	19	5	15	76,32
33	Papua Barat	2	-	2	100,00	-	-	-	#DIV/0!
34	Papua	-	-	-	#DIV/0!	2	2	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>206.359</b>	<b>67.402</b>	<b>138.956</b>	<b>67,34</b>	<b>82.316</b>	<b>15.682</b>	<b>66.634</b>	<b>80,95</b>

Ket : T = Terkena; P = Puso

Data periode laporan 12 November 2020

**Lampiran 12.**

**LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN JAGUNG**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	2.496	451	2.045	81,93	570	17	553	97,10
2	Sumatera Utara	495	256	240	48,38	8.377	-	8.377	100,00
3	Sumatera Barat	449	225	225	50,01	9	7	2	25,71
4	R i a u	97	30	67	69,28	-	-	-	#DIV/0!
5	J a m b i	459	324	135	29,38	307	2	305	99,35
6	Sumatera Selatan	182	119	63	34,66	-	-	-	#DIV/0!
7	Bengkulu	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
8	Lampung	346	279	67	19,36	26	-	26	100,00
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
13	Jawa Tengah	697	55	642	92,11	313	28	285	91,05
14	DI Yogyakarta	-	-	-	#DIV/0!	63	4	59	93,65
15	Jawa Timur	93	-	93	100,00	4.303	-	4.303	100,00
16	Banten	-	-	-	#DIV/0!	753	-	753	100,00
17	B a l i	-	-	-	#DIV/0!	21	-	21	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	2	-	2	100,00	25.244	565	24.679	97,76
19	Nusa Tenggara Timur	338	-	338	100,00	11.505	4.354	7.151	62,15
20	Kalimantan Barat	6	2	4	66,67	-	-	-	#DIV/0!
21	Kalimantan Tengah	1	0	0	54,55	74	51	23	31,29
22	Kalimantan Selatan	4	-	4	100,00	35	-	35	100,00
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	105	15	91	86,22	2	-	2	100,00
26	Sulawesi Tengah	470	171	299	63,62	377	67	310	82,23
27	Sulawesi Selatan	3.355	492	2.863	85,32	275	-	275	100,00
28	Sulawesi Tenggara	50	-	50	100,00	90	-	90	100,00
29	Gorontalo	232	14	219	94,19	3.197	54	3.142	98,30
30	Sulawesi Barat	56	12	43	77,93	14	-	14	100,00
31	M a l u k u	2	-	2	100,00	-	-	-	#DIV/0!
32	Maluku Utara	2	-	2	100,00	4	4	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
34	Papua	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		<b>9.936</b>	<b>2.444</b>	<b>7.492</b>	<b>75,40</b>	<b>55.557</b>	<b>5.152</b>	<b>50.405</b>	<b>90,73</b>

Data s.d. 12 November 2020

**Lampiran 13.**

**LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN KEDELAI**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	7	7	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2	Sumatera Utara	24	10	14	58,33	-	-	-	#DIV/0!
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
4	Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
5	Jambi	204	12	192	94,03	-	-	-	#DIV/0!
6	Sumatera Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
7	Bengkulu	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
8	Lampung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
13	Jawa Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
14	DI Yogyakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
15	Jawa Timur	2	2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
16	Banten	15	15	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17	Bali	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	#DIV/0!	175	55	120	68,57
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
20	Kalimantan Barat	1	-	1	100,00	-	-	-	#DIV/0!
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
26	Sulawesi Tengah	90	50	40	44,44	-	-	-	#DIV/0!
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
28	Sulawesi Tenggara	20	20	-	-	-	-	-	#DIV/0!
29	Gorontalo	-	-	-	#DIV/0!	102	-	102	100,00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
31	Maluku	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
32	Maluku Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
33	Papua Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
34	Papua	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		<b>363</b>	<b>116</b>	<b>247</b>	<b>67,96</b>	<b>277</b>	<b>55</b>	<b>222</b>	<b>80,14</b>

Data s.d. 12 November 2020

**Lampiran 14.**

**LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN KACANG TANAH**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	1	1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2	Sumatera Utara	22	5	18	79,55	-	-	-	#DIV/0!
3	Sumatera Barat	2	2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4	Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
5	Jambi	13	10	3	24,00	-	-	-	#DIV/0!
6	Sumatera Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
7	Bengkulu	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
8	Lampung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
13	Jawa Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
14	DI Yogyakarta	-	-	-	#DIV/0!	985	111	874	88,73
15	Jawa Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
16	Banten	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
17	Bali	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	#DIV/0!	8	-	8	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	#DIV/0!	53	-	53	100,00
20	Kalimantan Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	#DIV/0!	30	-	30	100,00
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
29	Gorontalo	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
30	Sulawesi Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
31	Maluku	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
32	Maluku Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
33	Papua Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
34	Papua	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>55,03</b>	<b>1.076</b>	<b>111</b>	<b>965</b>	<b>89,68</b>

Data s.d. 12 November 2020

**Lampiran 15.**

**LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN KACANG HIJAU**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	22	21	1	4,60	-	-	-	#DIV/0!
2	Sumatera Utara	9	-	9	100,00	-	-	-	#DIV/0!
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
4	Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
5	Jambi	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
6	Sumatera Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
7	Bengkulu	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
8	Lampung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
13	Jawa Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
14	DI Yogyakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
15	Jawa Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
16	Banten	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
17	Bali	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	#DIV/0!	22	-	22	100,00
20	Kalimantan Barat	27	2	25	92,59	-	-	-	#DIV/0!
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
29	Gorontalo	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
30	Sulawesi Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
31	Maluku	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
32	Maluku Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
33	Papua Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
34	Papua	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>60,61</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>

Data s.d. 12 November 2020

**Lampiran 16.**

**LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN UBI KAYU**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
2	Sumatera Utara	10	-	10	100,00	-	-	-	#DIV/0!
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
4	Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
5	Jambi	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
6	Sumatera Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
7	Bengkulu	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
8	Lampung	-	-	-	#DIV/0!	490	-	490	100,00
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
13	Jawa Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
14	DI Yogyakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
15	Jawa Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
16	Banten	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
17	Bali	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
19	Nusa Tenggara Timur	89	-	89	100,00	625	-	625	100,00
20	Kalimantan Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
21	Kalimantan Tengah	1	-	1	100,00	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
29	Gorontalo	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
30	Sulawesi Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
31	Maluku	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
32	Maluku Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
33	Papua Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
34	Papua	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>1.115</b>	-	<b>1.115</b>	<b>100,00</b>

Data s.d. 12 November 2020

**Lampiran 17.**

**LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN UBI JALAR**  
**MT 2019/2020**

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
2	Sumatera Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
4	R i a u	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
5	J a m b i	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
6	Sumatera Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
7	Bengkulu	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
8	Lampung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
11	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12	Jawa Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
13	Jawa Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
14	DI Yogyakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
15	Jawa Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
16	Banten	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
17	B a l i	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
20	Kalimantan Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
29	Gorontalo	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
30	Sulawesi Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
31	M a l u k u	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
32	Maluku Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
33	Papua Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
34	Papua	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!

Data s.d. 12 November 2020

**Lampiran 18.****REALISASI PPHT TAHUN 2020****ha**

No.	Provinsi	PPHT (Ha)												Total		
		Padi			Jagung			Kedelai/K. Tanah/K. Hijau			Ubi Kayu					
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	Aceh	150	150	100,00	15	15	100,00	10	10	100,00	-	-	-	175	175	100,00
2	Sumatera Utara	175	175	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	-	#DIV/0!	195	195	100,00	
3	Sumatera Barat	150	150	100,00	15	15	100,00	-	-	-	-	-	165	165	100,00	
4	Riau	25	25	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	100,00	
5	Jambi	50	50	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	-	-	70	70	100,00	
6	Sumatera Selatan	200	200	100,00	15	15	100,00	10	10	100,00	-	-	225	225	100,00	
7	Bengkulu	75	75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	100,00	
8	Lampung	175	175	100,00	15	15	100,00	10	10	100,00	10	10	100,00	210	210	100,00
9	Bangka Belitung	50	50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100,00	
10	Kep. Riau	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Banten	150	150	100,00	15	15	100,00	20	20	100,00	-	-	185	185	100,00	
12	DKI Jakarta	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	275	275	100,00	15	15	100,00	40	40	100,00	-	-	330	330	100,00	
14	Jawa Tengah	275	275	100,00	15	15	100,00	30	30	100,00	-	-	320	320	100,00	
15	DI.Yogyakarta	75	75	100,00	15	15	100,00	10	10	100,00	-	-	100	100	100,00	
16	Jawa Timur	275	275	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	-	#DIV/0!	295	295	100,00	
17	Bali	75	75	100,00	15	15	-	5	5	100,00	-	-	95	95	100,00	
18	NTB	175	175	100,00	15	15	100,00	30	30	100,00	-	-	220	220	100,00	
19	NTT	50	50	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	-	-	70	70	100,00	
20	Kalimantan Barat	100	100	100,00	-	-	-	10	10	100,00	-	-	110	110	100,00	
21	Kalimantan Tengah	25	25	100,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	25	25	100,00	
22	Kalimantan Selatan	175	175	100,00	15	15	100,00	20	20	100,00	-	-	210	210	100,00	
23	Kalimantan Timur	75	75	100,00	15	15	-	10	10	100,00	-	-	100	100	100,00	
24	Kalimantan Utara	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	75	75	100,00	15	15	100,00	10	10	100,00	-	-	100	100	100,00	
26	Sulawesi Tengah	75	75	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	-	-	95	95	100,00	
27	Sulawesi Selatan	200	200	100,00	15	15	100,00	30	30	100,00	-	-	245	245	100,00	
28	Sulawesi Tenggara	50	50	100,00	15	15	-	10	10	100,00	-	-	75	75	100,00	
29	Gorontalo	75	75	100,00	15	15	100,00	-	-	#DIV/0!	-	-	90	90	100,00	
30	Sulawesi Barat	25	25	100,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	25	25	100,00	
31	Maluku	50	50	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	-	-	70	70	100,00	
32	Maluku Utara	50	50	100,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	50	50	100,00	
33	Papua Barat	50	50	100,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	50	50	100,00	
34	Papua	25	25	100,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	25	25	100,00	
Jumlah (Ha)		3.450	3.450	100,00	330	330	100,00	285	285	100,00	10	10	100,00	4.075	4.075	100,00

Data s.d. 22 Januari 2021

**Lampiran 19.****REALISASI PPPDI TAHUN 2020**

No	Provinsi	PPPDI (Ha)		
		Rencana	Realisasi	% Capaian
1	Pemerintah Aceh	30	30	100,00
2	Sumatera Utara	30	30	100,00
3	Sumatera Barat	20	20	100,00
4	Riau	10	10	100,00
5	Jambi	10	10	100,00
6	Sumatera Selatan	40	40	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00
8	Lampung	30	30	100,00
9	Banten	30	30	100,00
10	Jawa Barat	40	40	100,00
11	Jawa Tengah	40	40	100,00
12	DI.Yogyakarta	20	20	100,00
13	Jawa Timur	40	40	100,00
14	NTB	20	20	100,00
15	NTT	40	40	100,00
16	Kalimantan Barat	10	10	100,00
17	Kalimantan Selatan	20	20	100,00
18	Sulawesi Tengah	20	20	100,00
19	Sulawesi Selatan	40	40	100,00
20	Sulawesi Tenggara	10	10	100,00
21	Gorontalo	20	20	100,00
22	Maluku	20	20	100,00
<b>Jumlah (Ha)</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100,00</b>

Data s.d. 22 Januari 2021

**Lampiran 20.****REALISASI GERAKAN PENGENDALIAN OPT TAHUN 2020**

NO	PROVINSI	Gerakan Pengendalian (Unit)											
		Padi			Jagung			Kedelai			Total		
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Rencana	Realisasi	% Capaian	Rencana	Realisasi	% Capaian	Rencana	Realisasi	% Capaian
1	Aceh	508	508	100,00	129	129	100,00	20	20	100,00	657	657	100,00
2	Sumatera Utara	400	400	100,00	92	92	100,00	20	20	100,00	512	512	100,00
3	Sumatera Barat	254	254	100,00	74	74	100,00		-		328	328	100,00
4	Riau	190	190	100,00	74	74	100,00		-		264	264	100,00
5	Jambi	190	190	100,00	74	74	100,00	20	20	100,00	284	284	100,00
6	Sumatera Selatan	1.175	1.175	100,00	325	325	100,00	20	20	100,00	1.520	1.520	100,00
7	Bengkulu	190	190	100,00	74	74	100,00		-		264	264	100,00
8	Lampung	635	635	100,00	160	160	100,00	27	27	100,00	822	822	100,00
9	Bangka Belitung	89	50	56,18					-		89	50	56,18
10	Kep. Riau								-				
11	Banten	508	458	90,16	135	135	100,00	33	33	100,00	676	626	92,60
12	DKI Jakarta								-				
13	Jawa Barat	2.476	2.476	100,00	700	700	100,00	53	53	100,00	3.229	3.229	100,00
14	Jawa Tengah	2.222	2.222	100,00	602	602	100,00	53	53	100,00	2.877	2.877	100,00
15	DI.Yogyakarta	444	444	100,00	117	117	100,00	20	20	100,00	581	581	100,00
16	Jawa Timur	1.651	1.651	100,00	467	467		53	53	100,00	2.171	2.171	100,00
17	Bali	317	317	100,00	74	74			-		391	391	100,00
18	NTB	190	190	100,00	50	50	100,00	53	53	100,00	293	293	100,00
19	NTT	317	256	80,76	92	92	100,00	13	13	100,00	422	361	85,55
20	Kalimantan Barat	254	254	100,00	49	49	100,00	13	13	100,00	316	316	100,00
21	Kalimantan Tengah	254	254	100,00	68	68	100,00	13	13	100,00	335	335	100,00
22	Kalimantan Selatan	255	255	100,00	68	68	100,00	33	33	100,00	356	356	100,00
23	Kalimantan Timur	254	254	100,00	49	49		20	-		323	303	93,81
24	Kalimantan Utara								-				
25	Sulawesi Utara	254	254	100,00	49	49	100,00	20	20	100,00	323	323	100,00
26	Sulawesi Tengah	286	286	100,00	68	68	100,00	20	20	100,00	374	374	100,00
27	Sulawesi Selatan	698	698	100,00	184	184	100,00	53	53	100,00	935	935	100,00
28	Sulawesi Tenggara	222	222	100,00	184	184	100,00	14	14		420	420	100,00
29	Gorontalo	222	222	100,00	74	74	100,00	14	14	100,00	310	310	100,00
30	Sulawesi Barat	222	222	100,00	68	68	100,00		-		290	290	100,00
31	Maluku	222	175	78,83	25	25	100,00	15	15	100,00	262	215	82,06
32	Maluku Utara	128	128	100,00	25	25	100,00		-		153	153	100,00
33	Papua Barat	128	128	100,00	25	25			-		153	153	100,00
34	Papua	128	128	100,00	25	25	100,00		-		153	153	100,00
JUMLAH		15.283	15.086	98,71	4.200	4.200	100,00	600	580	96,67	20.083	19.866	98,92

Data s.d. 22 Januari 2021

**Lampiran 21.****REALISASI BAHAN PERBANYAKAN APH/REFUGIA TAHUN 2020**

No	Provinsi	PERBANYAKAN APH/REFUGIA					
		Target		Realisasi			
				Fisik	Anggaran	Unit	%
1	Aceh	3	75.000.000	3	100,00	75.000.000	100,00
2	Sumatera Utara	4	40.000.000	4	100,00	40.000.000	100,00
3	Sumatera Barat	3	21.000.000	3	100,00	21.000.000	100,00
4	Riau	1	25.000.000	1	100,00	25.000.000	100,00
5	Jambi	1	25.000.000	1	100,00	25.000.000	100,00
6	Sumatera Selatan	4	100.000.000	4	100,00	100.000.000	100,00
7	Bengkulu	1	10.560.000	1	100,00	10.560.000	100,00
8	Lampung	4	100.000.000	4	100,00	100.000.000	100,00
9	Bangka Belitung	1	25.000.000	1	100,00	25.000.000	100,00
10	Kep. Riau	-	-				
11	Banten	2	50.000.000	2	100,00	50.000.000	100,00
12	DKI Jakarta		-				
13	Jawa Barat	11	198.000.000	11	100,00	198.000.000	100,00
14	Jawa Tengah	12	300.000.000	12	100,00	300.000.000	100,00
15	DI.Yogyakarta	1	25.000.000	1	100,00	24.625.000	98,50
16	Jawa Timur	7	175.000.000	7	100,00	175.000.000	100,00
17	Bali	1	25.000.000	1	100,00	24.746.400	98,99
18	NTB	2	50.000.000	2	100,00	50.000.000	100,00
19	NTT	2	20.000.000	2	100,00	20.000.000	100,00
20	Kalimantan Barat	2	50.000.000	2	100,00	49.828.000	99,66
21	Kalimantan Tengah	1	25.000.000	1	100,00	25.000.000	100,00
22	Kalimantan Selatan	2	50.000.000	2	100,00	49.996.000	99,99
23	Kalimantan Timur	2	30.000.000	2	100,00	30.000.000	100,00
24	Kalimantan Utara	-	-				
25	Sulawesi Utara	1	25.000.000	1	100,00	25.000.000	100,00
26	Sulawesi Tengah	2	50.000.000	2	100,00	50.000.000	100,00
27	Sulawesi Selatan	4	100.000.000	4	100,00	100.000.000	100,00
28	Sulawesi Tenggara	4	100.000.000	4	100,00	100.000.000	100,00
29	Gorontalo	1	25.000.000	1	100,00	24.550.000	98,20
30	Sulawesi Barat	2	50.000.000	2	100,00	50.000.000	100,00
31	Maluku	2	50.000.000	2	100,00	50.000.000	100,00
32	Maluku Utara	1	25.000.000	1	100,00	25.000.000	100,00
33	Papua Barat	1	25.000.000	1	100,00	25.000.000	100,00
34	Papua	1	14.000.000	1	100,00	14.000.000	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>86</b>	<b>1.883.560.000</b>	<b>86</b>	<b>100,00</b>	<b>1.882.305.400</b>	<b>99,93</b>

Data s.d. 22 Januari 2021

**Lampiran 22.****REALISASI RUMAH BURUNG HANTU TAHUN 2020**

No	Provinsi	RUMAH BURUNG HANTU					
		Target		Realisasi			
				Fisik	Anggaran	Unit	%
1	Aceh	75	150.000.000	75		150.000.000	
2	Sumatera Utara	50	100.000.000	50	100,00	100.000.000	100,00
3	Sumatera Barat	20	40.000.000	20		40.000.000	
4	Riau		-				
5	Jambi	25	50.000.000	25		50.000.000	
6	Sumatera Selatan	75	150.000.000	75	100,00	150.000.000	100,00
7	Bengkulu		-				
8	Lampung	50	100.000.000	50	100,00	100.000.000	100,00
9	Bangka Belitung						
10	Kep. Riau						
11	Banten						
12	DKI Jakarta						
13	Jawa Barat	100	200.000.000	100	100,00	200.000.000	100,00
14	Jawa Tengah	100	200.000.000	100	100,00	200.000.000	100,00
15	DI.Yogyakarta	25	50.000.000	25		49.750.000	
16	Jawa Timur	75	150.000.000	75	100,00	150.000.000	100,00
17	Bali	25	50.000.000	25		50.000.000	
18	NTB	10	20.000.000	10		20.000.000	
19	NTT		-				
20	Kalimantan Barat		-	-		-	
21	Kalimantan Tengah	25	50.000.000	19		38.000.000	
22	Kalimantan Selatan		-				
23	Kalimantan Timur	25	50.000.000	25		50.000.000	
24	Kalimantan Utara		-				
25	Sulawesi Utara	25	50.000.000	25		50.000.000	
26	Sulawesi Tengah		-				
27	Sulawesi Selatan	75	150.000.000	75	100,00	150.000.000	100,00
28	Sulawesi Tenggara		-				
29	Gorontalo		-	-		-	
30	Sulawesi Barat		-				
31	Maluku		-				
32	Maluku Utara		-				
33	Papua Barat						
34	Papua		-				
<b>Jumlah</b>		<b>780</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>774</b>	<b>99,23</b>	<b>1.547.750.000</b>	<b>99,21</b>

Data s.d. 22 Januari 2021

**Lampiran 23.****REALISASI POS PENGENDALI AGENS HAYATI (PPAH) TAHUN 2020**

No	Provinsi	PPAH					
		Target		Realisasi			
		Fisik	Anggaran	Unit	%	Rp. 000	%
1	Aceh	3	30.000.000	3	100	30.000.000	100
2	Sumatera Utara	4	40.000.000	4	100	40.000.000	100
3	Sumatera Barat	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
4	Riau	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
5	Jambi	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
6	Sumatera Selatan					-	
7	Bengkulu	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
8	Lampung	5	50.000.000	5	100	50.000.000	100
9	Bangka Belitung	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
10	Kep. Riau						
11	Banten						
12	DKI Jakarta						
13	Jawa Barat	15	150.000.000	15	100	150.000.000	100
14	Jawa Tengah	12	120.000.000	12	100	120.000.000	100
15	DI.Yogyakarta	4	40.000.000	4	100	39.000.000	
16	Jawa Timur	10	100.000.000	10	100	100.000.000	100
17	Bali	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
18	NTB	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
19	NTT	2	20.000.000	2	100	20.000.000	100
20	Kalimantan Barat						
21	Kalimantan Tengah				#DIV/0!		#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	2	20.000.000	2	100	20.000.000	100
23	Kalimantan Timur	2	20.000.000	2	100	20.000.000	100
24	Kalimantan Utara						
25	Sulawesi Utara	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
26	Sulawesi Tengah	2	20.000.000	2	100	20.000.000	100
27	Sulawesi Selatan	5	50.000.000	5	100	50.000.000	100
28	Sulawesi Tenggara						
29	Gorontalo			-			
30	Sulawesi Barat						
31	Maluku	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
32	Maluku Utara	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
33	Papua Barat	1	10.000.000	1	100	10.000.000	100
34	Papua	-	-		#DIV/0!		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>770.000.000</b>	<b>77</b>	<b>100,00</b>	<b>769.000.000</b>	<b>99,87</b>

Data s.d. 22 Januari 2021

**Lampiran 24.**

**REALISASI KEGIATAN PENANGANAN KEKERINGAN (SUMUR SUNTIK)**  
**TAHUN 2020**

No	Provinsi	Target Alokasi			Realisasi				%
		Luas (Ha)	Paket	Anggaran (Rp)	Luas (Ha)	%	Paket	Anggaran (Rp)	
1	Aceh	69	5	62.500.000	69	100	5	62.500.000	100
2	Sumatera Utara						-	-	
3	Sumatera Barat	135	13	162.500.000	135	100	13	162.500.000	100
4	Riau						-	-	
5	Jambi						-	-	
6	Sumatera Selatan						-	-	
7	Lampung	200	16	200.000.000	200	100	16	200.000.000	100
8	Jawa Barat	238	19	237.500.000	238	100	19	237.500.000	100
10	Dl. Yogyakarta	250	20	250.000.000	250	100	20	250.000.000	100
	Jawa Tengah	75	6	75.000.000	75	100	6	75.000.000	100
11	Jawa Timur	375	29	362.500.000	375	100	29	362.500.000	100
22	Sulawesi Selatan	591	32	400.000.000	591	100	32	400.000.000	100
Jumlah		1.933	140	1.750.000.000	1.933		140	1.750.000.000	

Data s.d. 22 Januari 2021

**Lampiran 25.****REALISASI BANTUAN SARANA PENAMPUNG/PENGALIRAN AIR TAHUN 2020**

No	Provinsi	Luas Lahan (ha)	Alokasi Sarana Pengaliran Air (Paket)	Anggaran (Rp)	FISIK (paket)	ANGGARAN (Rp) SP2D		
1	Aceh	183	4	200.000.000	4	100	200.000.000	100
2	Jawa Barat	60	1	50.000.000	1	100	50.000.000	100
3	Jawa Timur	125	5	250.000.000	5	100	250.000.000	100
4	Jawa Tengah	250	8	400.000.000	8	100	400.000.000	100
<b>Jumlah</b>		<b>618</b>	<b>18</b>	<b>900.000.000</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100</b>

Data s.d. 22 Januari 2021

**Lampiran 26.****REALISASI BANTUAN SARANA PENGENDALIAN OPT TAHUN 2020**

No	Provinsi	Sarana Pengendalian OPT					
		Target		Realisasi			
				Fisik	Anggaran	RP. (000)	%
1	Aceh	1	120.000.000	1	100	119.952.000	99,96
2	Sumatera Utara	2	130.433.000	2	100	124.706.500	95,61
3	Sumatera Barat	1	98.000.000	1	100	98.000.000	100,00
4	Riau			-		-	-
5	Jambi	3	107.800.000	3	100	107.573.000	99,79
6	Sumatera Selatan	2	170.000.000	2	100	168.042.500	98,85
7	Bengkulu	1	50.000.000	1	100	49.469.500	98,94
8	Lampung	1	135.000.000	1	100	134.843.000	99,88
9	Bangka Belitung	1	32.000.000	1	100	32.000.000	100,00
10	Kep. Riau						-
11	Banten	1	240.000.000	1	100	237.087.500	98,79
12	DKI Jakarta						-
13	Jawa Barat	1	290.000.000	1	100	287.325.000	99,08
14	Jawa Tengah*	2	523.704.000	2	100	523.703.200	100,00
15	DI.Yogyakarta	1	14.000.000	1	100	14.000.000	100,00
16	Jawa Timur	1	120.600.000	1	100	119.996.000	99,50
17	Bali			-		-	-
18	NTB	1	153.000.000	1	100	151.692.255	99,15
19	NTT						-
20	Kalimantan Barat	1	9.600.000	1	100	9.536.000	99,33
21	Kalimantan Tengah	1	25.000.000	1	100	24.883.500	99,53
22	Kalimantan Selatan	1	180.000.000	1	100	179.534.300	99,74
23	Kalimantan Timur	1	6.000.000	1	100	5.934.000	98,90
24	Kalimantan Utara						-
25	Sulawesi Utara	1	76.050.000	1	100	76.010.000	99,95
26	Sulawesi Tengah	1	44.000.000	1	100	43.806.400	99,56
27	Sulawesi Selatan	3	221.600.000	3	100	221.600.000	100,00
28	Sulawesi Tenggara	1	82.000.000	1	100	81.897.500	99,88
29	Gorontalo	1	150.000.000	1	100	149.817.000	99,88
30	Sulawesi Barat	1	9.000.000	1	100	9.000.000	100,00
31	Maluku	1	64.250.000	1	100	64.200.700	99,92
32	Maluku Utara			-		-	-
33	Papua Barat	2	50.000.000	2	100	50.000.000	100,00
34	Papua	1	66.860.000	1	100	66.860.000	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>3.168.897.000</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>	<b>3.151.469.855</b>	<b>99,45</b>

Data s.d. 22 Januari 2021

**Lampiran 27.**

**REALISASI GERAKAN PENGENDALIAN OPT PADAT KARYA SEREALIA**  
**TAHUN 2020**

NO	PROVINSI	TARGET		REALISASI		HOK	TENAGA KERJA		% REALISASI	
		FISIK (Ha)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (Ha)	KEUANGAN (Rp)	(Rp)	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	ACEH	1.125	450.000.000	1.125	450.000.000	337.500.000	4.500	4.500	100,00	100,00
2	SUMATERA UTARA	1.325	530.000.000	1.325	530.000.000	397.500.000	5.300	5.300	100,00	100,00
3	SUMATERA BARAT	490	196.000.000	490	196.000.000	147.000.000	1.960	1.960	100,00	100,00
4	RIAU	175	70.000.000	175	70.000.000	52.500.000	700	700	100,00	100,00
5	SUMATERA SELATAN	1.662	664.800.000	1.662	664.800.000	498.600.000	6.648	6.648	100,00	100,00
6	LAMPUNG	3.510	1.404.000.000	3.510	1.404.000.000	1.053.000.000	14.040	14.040	100,00	100,00
7	BANTEN	577	230.800.000	577	230.800.000	173.100.000	2.308	2.308	100,00	100,00
8	JAWA BARAT	4.487	1.794.800.000	4.487	1.794.800.000	1.346.100.000	17.948	17.948	100,00	100,00
9	JAWA TENGAH	5.137	2.054.800.000	5.137	2.054.800.000	1.541.100.000	20.548	20.548	100,00	100,00
10	JAWA TIMUR	2.307	922.800.000	2.307	922.800.000	692.100.000	9.228	9.228	100,00	100,00
11	BALI	325	130.000.000	325	130.000.000	97.500.000	1.300	1.300	100,00	100,00
12	NTB	978	391.200.000	978	391.200.000	293.400.000	3.912	3.912	100,00	100,00
13	NTT	145	58.000.000	145	58.000.000	43.500.000	580	580	100,00	100,00
14	KALIMANTAN BARAT	426	170.400.000	426	170.400.000	127.800.000	1.704	1.704	100,00	100,00
15	KALIMANTAN TENGAH	568	227.200.000	568	227.200.000	170.400.000	2.272	2.272	100,00	100,00
16	KALIMANTAN SELATAN	546	218.400.000	546	218.400.000	163.800.000	2.184	2.184	100,00	100,00
17	KALIMANTAN TIMUR	462	184.800.000	462	184.800.000	138.600.000	1.848	1.848	100,00	100,00
18	SULAWESI SELATAN	1.125	450.000.000	1.125	450.000.000	337.500.000	4.500	4.500	100,00	100,00
19	SULAWESI TENGGARA	407	162.800.000	407	162.800.000	122.100.000	1.628	1.628	100,00	100,00
20	SULAWESI BARAT	999	399.600.000	999	399.600.000	299.700.000	3.996	3.996	100,00	100,00
21	PAPUA	178	71.200.000	178	71.200.000	53.400.000	712	712	100,00	100,00
22	MALUKU	87	34.800.000	87	34.800.000	26.100.000	348	348	100,00	100,00
23	MALUKU UTARA	84	33.600.000	84	33.600.000	25.200.000	336	336	100,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>27.125</b>	<b>10.850.000.000</b>	<b>27.125</b>	<b>10.850.000.000</b>	<b>8.137.500.000</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran 28.**

**REALISASI GERAKAN PENGENDALIAN OPT PADAT KARYA AKABI TAHUN  
2020**

NO	PROVINSI	TARGET		REALISASI		HOK	TENAGA KERJA		% REALISASI	
		FISIK (Ha)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (Ha)	KEUANGAN (Rp)	(Rp)	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	BANTEN	10	4.000.000	10	4.000.000	3.000.000	40	40	100,00	100,00
2	DI YOGYAKARTA	60	24.000.000	60	24.000.000	18.000.000	240	240	100,00	100,00
3	JAWA TENGAH	20	8.000.000	20	8.000.000	6.000.000	80	80	100,00	100,00
4	JAWA TIMUR	100	40.000.000	100	40.000.000	30.000.000	400	400	100,00	100,00
5	LAMPUNG	50	20.000.000	50	20.000.000	15.000.000	200	200	100,00	100,00
6	SULAWESI SELATAN	40	16.000.000	40	16.000.000	12.000.000	160	160	100,00	100,00
7	SULAWESI TENGAH	10	4.000.000	10	4.000.000	3.000.000	40	40	100,00	100,00
8	SUMATERA UTARA	45	18.000.000	45	18.000.000	13.500.000	180	180	100,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>335</b>	<b>134.000.000</b>	<b>335</b>	<b>134.000.000</b>	<b>100.500.000</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran 29.****REALISASI PENANGANAN DPI PADAT KARYA TAHUN 2020**

NO	PROVINSI	TARGET		REALISASI		TENAGA KERJA		%	
		FISIK (Ha)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (Ha)	KEUANGAN (Rp)	TARGET	REALISASI	KEUANGAN	TENAGA KERJA
1	Aceh	1.250	462.500.000	1.000	301.800.000	1.250	1.000	65,25	80,00
13	Sumatera Utara	150	57.500.000	750	232.139.100	150	750	403,72	500,00
12	Sumatera Barat	400	150.000.000	295	106.500.000	400	295	71,00	73,75
10	Riau	500	190.000.000	555	196.959.100	500	555	103,66	111,00
24	Jambi	200	75.000.000	300	110.000.000	200	300		
5	Sumatera Selatan	300	110.000.000	275	58.214.800	300	275	52,92	91,67
8	Lampung	2.000	725.000.000	500	179.600.000	2.000	500	24,77	25,00
9	Jawa Barat	2.000	725.000.000	3.000	989.050.000	2.000	3.000	136,42	150,00
11	Jawa Tengah	2.000	737.500.000	2.500	809.040.000	2.000	2.500	109,70	125,00
16	DI. Yogyakarta	200	77.500.000	500	190.000.000	200	500		250,00
18	Jawa Timur	500	187.500.000	2.300	700.250.000	500	2.300	373,47	460,00
17	Banten	250	97.500.000	400	123.600.000	250	400	126,77	160,00
19	Bali	500	187.500.000	120	36.218.000	500	120	19,32	24,00
7	Nusa Tenggara Barat	500	190.000.000	1.000	326.400.000	500	1.000	171,79	200,00
14	Nusa Tenggara Timur	500	190.000.000	250	89.900.000	500	250	47,32	50,00
15	Kalimantan Barat	250	95.000.000	200	77.500.000	250	200	81,58	80,00
26	Kalimantan Tengah	2.900	1.217.500.000	250	83000000	2.900	250		
4	Kalimantan Selatan	500	190.000.000	14	3.991.500	500	14	2,10	2,80
25	Kalimantan Timur	250	95.000.000	528	183.700.000	250	528		
22	Sulawesi Utara	2.000	725.000.000	200	69.700.000	2.000	200	9,61	10,00
21	Sulawesi Tengah	500	190.000.000	500	176.940.000	500	500		
23	Sulawesi Selatan	400	150.000.000	2.500	835.148.043	400	2.500		
20	Sulawesi Tenggara	200	75.000.000	400	145.508.600	200	400	194,01	200,00
3	Gorontalo	500	190.000.000	200	65.000.000	500	200	34,21	40,00
6	Sulawesi Barat	500	225.000.000	70	26.854.000	500	70	11,94	14,00
2	Subang	750	285.000.000	500	175.600.000	750	500	61,61	66,67
<b>JUMLAH</b>		<b>20.000</b>	<b>7.600.000.000</b>	<b>19.107</b>	<b>6.292.613.143</b>	<b>20.000</b>	<b>19.107</b>	<b>82,80</b>	<b>95,54</b>

**Lampiran 30.**

**REALISASI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SUMUR BOR SOLAR CELL  
DAN *ENGINE DIESEL* TAHUN 2020**

NO.	URAIAN	SATUAN	TARGET		REALISASI				KET
			VOL	RP	VOL	%	RP	%	
9	Pembangunan Sumur Bor Solar Cell FE Sumba Tengah (1764)	Paket	4	1.050.000.000	4	100,00	1.050.000.000	100,00	Transfer Uang
	Pembangunan Sumur Bor Solar Cell FE Sumba Tengah (1766)	Paket	6	1.575.000.000	6	100,00	1.575.000.000	100,00	Transfer Uang
	Rehab Sumur Bor Solar Cell FE Sumba Tengah (1766)	Paket	10	1.575.000.000	10	100,00	1.575.000.000	100,00	Transfer Uang
	Rehab Sumur Bor Engine Diesel FE Sumba Tengah (1766)	Paket	3	270.000.000	3	100,00	270.000.000	100,00	Transfer Uang
JUMLAH		Paket	23	4.470.000.000	23		4.470.000.000		